

**ANALISIS REKONSILIASI KOREA SELATAN DAN JEPANG DALAM
KONFLIK COMFORT WOMEN MELALUI AGREEMENT ON COMFORT
WOMEN TAHUN 2015**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Ezra Day Sitorus

145120401111007

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020





HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS REKONSILIASI KOREA SELATAN DAN JEPANG DALAM
KONFLIK COMFORT WOMEN MELALUI AGREEMENT ON COMFORT
WOMEN TAHUN 2015**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Ezra Day Sitorus
145120401111007

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA

Aswin Ariyanto Azis S.IP., M.DevSt

NIP. 198408232015041001

NIP. 19780220201121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis S.IP., M.DevSt

NIP. 19780220201121001

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS REKONSILIASI KOREA SELATAN DAN JEPANG DALAM KONFLIK COMFORT WOMEN MELALUI AGREEMENT ON COMFORT WOMEN TAHUN 2015

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Ezra Day Sitorus

145120401111007

Telah dinyatakan LULUS dalam Ujian Sarjana pada tanggal 26 Maret 2020:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Firstyarinanda Valentina I., S.Sos., M.Si

Vita Amalia P, S.IP., MA

NIK. 197908082014042001

NIP.197712072008012016

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2

Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA.

Aswin Ariyanto Azis S.IP., M.DevSt

NIP. 198408232015041001

NIP. 19780220201121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigo, S.E., M.Si., AK.

NIP. 196908141994021001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Ezra Day Sitorus

NIM : 145120401111007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **ANALISIS REKONSILIASI KOREA SELATAN DAN JEPANG DALAM KONFLIK COMFORT WOMEN MELALUI *AGREEMENT ON COMFORT WOMEN* TAHUN 2015**” adalah benar-benar merupakan karya sendiri. Sedangkan untuk hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi catatan kaki serta dirujuk kembali dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Malang, 12 Maret 2020

Yang Berhormat,



Ezra Day Sitorus
NIM. 145120401111007

KATA PENGANTAR

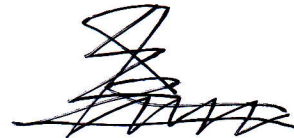
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi **ANALISIS REKONSILIASI KOREA SELATAN DAN JEPANG DALAM KONFLIK COMFORT WOMEN MELALUI AGREEMENT ON COMFORT WOMEN TAHUN 2015** dapat terselesaikan. Skripsi yang disusun ini, penulis susun berdasarkan dengan apa yang penulis lakukan dan penulis rasakan selama mengerjakan skripsi

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, membantu serta mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga proses pembuatan skripsi ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, terutama kepada:

1. Tuhan Yesus yang memberikan limpahan rahmat serta berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA dan Bapak Aswin Ariyanto Azis S.IP., M.DevSt selaku dosen pembimbing yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, saran, maupun ide terkait skripsi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Firstyarinda Valentina I., S.Sos., M.Si dan juga Ibu Vita Amalia P, S.IP., MA yang telah menguji skripsi penulis dan juga memberikan kritik serta masukan membangun yang berguna dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi penulis.

4. Semua Bapak dan Ibu Dosen, serta Administrasi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
5. Kedua orangtua penulis, kakak, dan adik, atas segala bimbingan, nasihat, semangat dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menjalankan perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Teman-teman HI UB 2014 yang selalu saling memberikan semangat dan mengingatkan satu sama lain selama proses perkuliahan penulis.
7. Pihak-pihak lain yang membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.

Malang 12 Maret 2020



Ezra Day Sitorus

ANALISIS REKONSILIASI KOREA SELATAN DAN JEPANG DALAM
KONFLIK COMFORT WOMEN MELALUI AGREEMENT ON COMFORT
WOMEN TAHUN 2015

Ezra Day Sitorus

145120401111007

ABSTRAK

Korea Selatan dan Jepang merupakan dua negara yang memiliki kedekatan geografis serta berbagai persamaan nilai dan budaya maupun rumpun. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat hubungan bilateral kedua negara dari segala aspek berjalan mulus. Hal ini karena masih adanya dosa perang masa lalu yang membekas saat Jepang menduduki Korea Selatan. Masa lalu kelam itu salah satunya adalah sistem perbudakan seksual yang dilakukan oleh tentara militer Jepang terhadap masyarakat Korea Selatan yang kemudian dikenal dengan istilah *comfort women* atau jugun ianfu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses rekonsiliasi Korea Selatan-Jepang dalam mengatasi konflik *comfort women* melalui *agreement on comfort women* .. Penelitian ini menggunakan konsep puzzle rekonsiliasi yang dikemukakan oleh Valerie Rosoux (2017) guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.. Dalam hal ini Pemerintah Jepang akan memberikan kompensasi sebesar 1 miliar yen atau setara dengan 8,3 juta dollar kepada para mantan *comfort women* Korea Selatan.

Kata Kunci : Comfort Women, Rekonsiliasi, Puzzle Rekonsiliasi, Korea Selatan, Jepang

ANALYSIS OF SOUTH KOREA AND JAPAN RECONCILIATION IN THE
COMFORT WOMEN CONFLICT THROUGH AGREEMENT ON COMFORT
WOMEN 2015

Ezra Day Sitorus

145120401111007

ABSTRACT

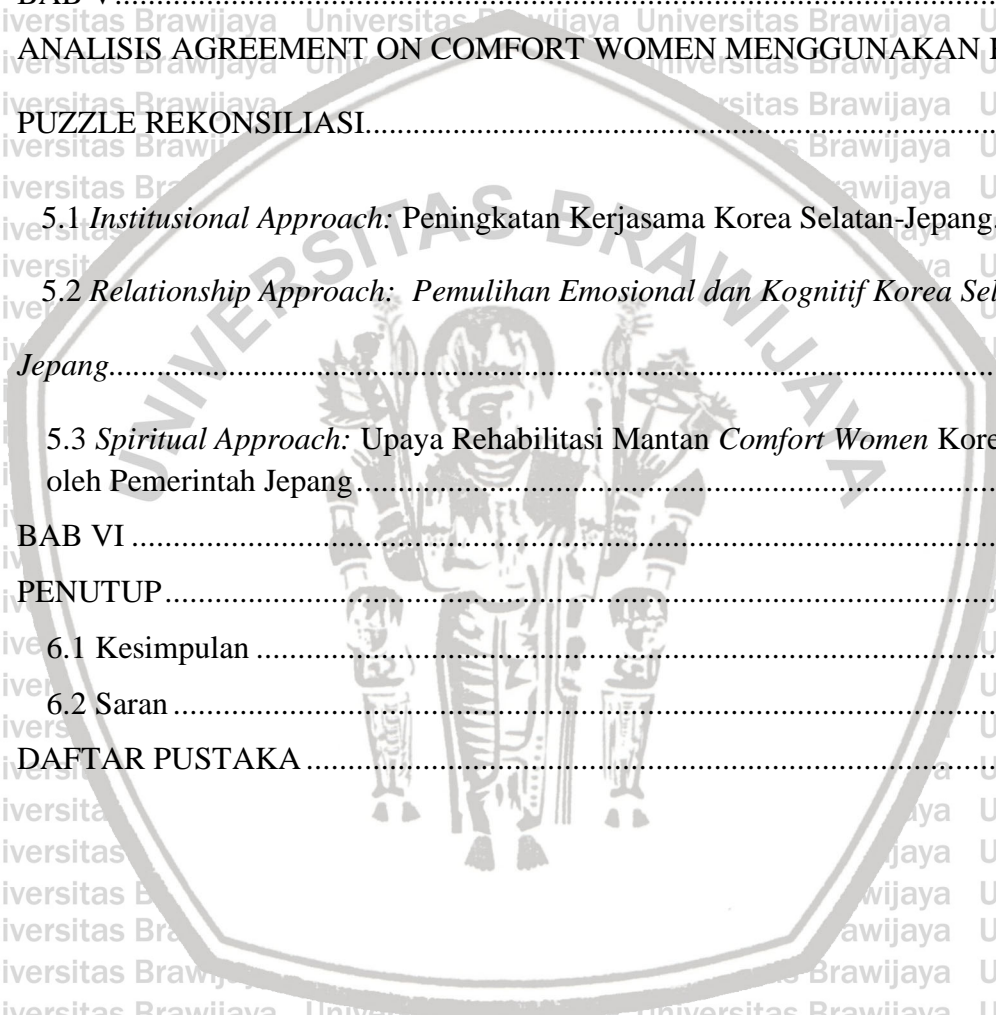
South Korea and Japan are two countries that have geographical proximity and a variety of values and cultures and families. However, this does not make bilateral relations between the two countries from all aspects run smoothly. This is because there are still past sins that left an impression when Japan accepted South Korea. One of the dark past is the sexy slavery system carried out by the Japanese military against South Korean society which came to be known as the comfort of women or *jugun-ianfu*. This research was conducted with the aim of studying and analyzing the South Korean-Japanese reconciliation process in resolving female entertainers' conflicts through an *agreement on comfort women*. This research uses the concept of puzzle reconciliation proposed by Valerie Rosoux (2017) to answer the problem formulation that has been determined. In this case the Japanese Government will provide compensation of 1 billion yen, equivalent to 8.3 million dollars for the comfort of South Korean women.

Keyword : Comfort Women, Reconciliation, Puzzle Reconciliation, South Korea, Japan

DAFTAR ISI

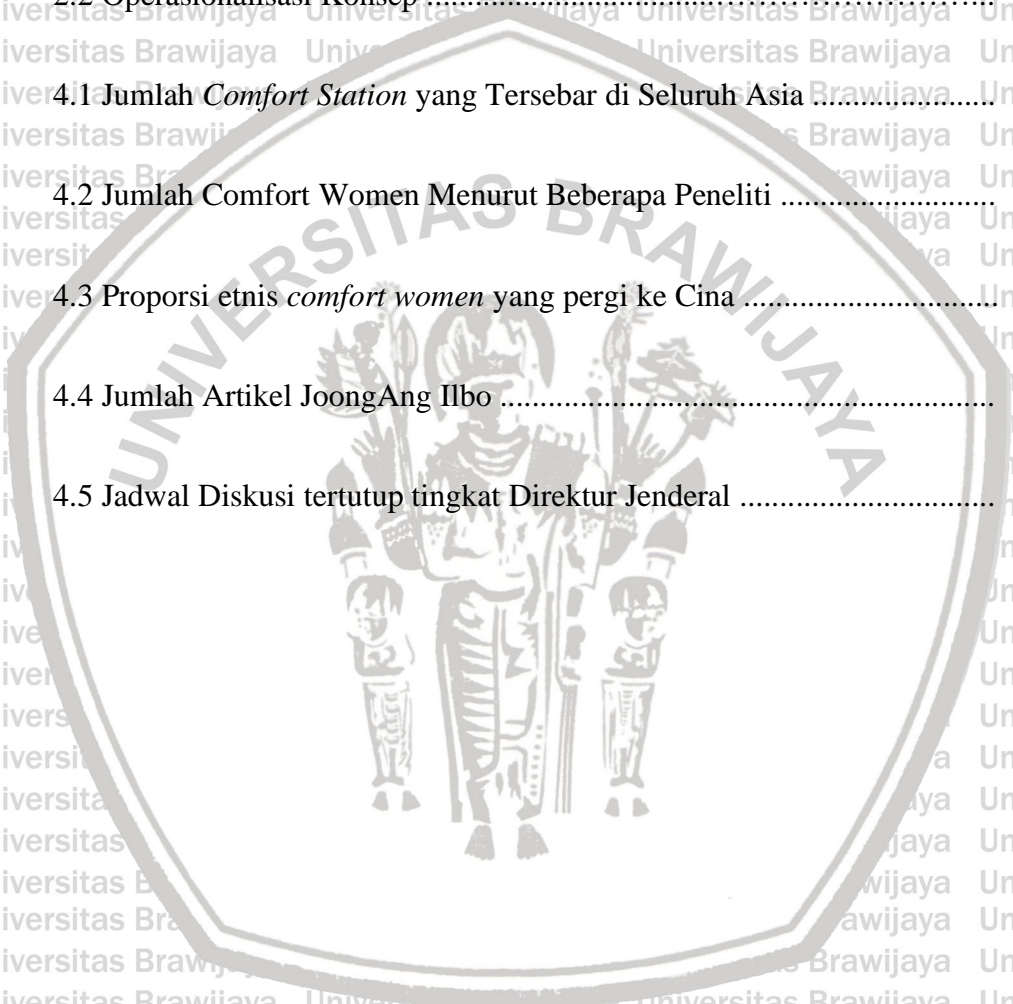
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	11
KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
2.1 Studi Terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Konseptual.....	21
2.3 Definisi Konseptual.....	27
2.4 Operasionalisasi Konsep.....	30
2.5 Alur Pemikiran.....	32
2.6 Argumen Utama.....	33
METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Teknik Analisis Data.....	35
	viii

3.5 Sistematika Penulisan.....	36
BAB IV	39
GAMBARAN UMUM	39
4.1 Sejarah <i>Comfort Women</i> di Korea Selatan.....	39
4.2 Korea Selatan dan Jepang dalam Memandang Isu <i>Comfort Women</i>	52
4.3 Agreement on Comfort Women.....	61
BAB V.....	68
ANALISIS AGREEMENT ON COMFORT WOMEN MENGGUNAKAN KONSEP PUZZLE REKONSILIASI.....	68
5.1 <i>Institutional Approach</i> : Peningkatan Kerjasama Korea Selatan-Jepang.....	71
5.2 <i>Relationship Approach</i> : <i>Pemulihan Emosional dan Kognitif Korea Selatan- Jepang</i>	77
5.3 <i>Spiritual Approach</i> : Upaya Rehabilitasi Mantan <i>Comfort Women</i> Korea Selatan oleh Pemerintah Jepang.....	81
BAB VI	86
PENUTUP	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89



DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah <i>ianfu</i> berdasarkan perkiraan ilmuwan	4
2.1 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Penelitian	20
2.2 Operasionalisasi Konsep	29
4.1 Jumlah <i>Comfort Station</i> yang Tersebar di Seluruh Asia	43
4.2 Jumlah <i>Comfort Women</i> Menurut Beberapa Peneliti	44
4.3 Proporsi etnis <i>comfort women</i> yang pergi ke Cina	46
4.4 Jumlah Artikel JoongAng Ilbo	52
4.5 Jadwal Diskusi tertutup tingkat Direktur Jenderal	60



DAFTAR GAMBAR

2.1 Three Major Pieces of The Puzzle Of Reconciliation 22

4.1 Peta Lokasi *Comfort Station* di Zaoqing 40

4.2 General Yasuji Okamura 42

4.3 *Comfort Women* Korea Yang Selamat Dan Dilindungi 47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan tidak stabilnya hubungan antar negara bisa disebabkan oleh aspek sejarah. Seperti yang terjadi pada hubungan politik luar negeri antara Korea Selatan dan Jepang. Sejak tahun 1910-1945, Jepang menduduki Korea Selatan, dan ternyata masih banyak dosa perang yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yang menjadi penyebab kurang harmonisnya hubungan politik luar negeri Jepang dan Korea Selatan dimasa depan¹. Pada hakikatnya, Korea Selatan dan Jepang merupakan dua negara yang memiliki kedekatan geografis serta berbagai persamaan nilai dan budaya maupun rumpun. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat hubungan bilateral kedua negara dari segala aspek berjalan mulus.

Hubungan kedua negara masih tidak mendapatkan titik terang meski Korea Selatan sudah tidak menjadi negara koloni Jepang. Dosa-dosa masa lalu seperti penjajahan yang terkenal keji dan juga isu wanita penghibur atau budak seks yang digunakan oleh militer Jepang selama masa penjajahan dan Perang Dunia II, merupakan isu pelik yang turut mendapat kecaman dari dunia Internasional. Semua memori pahit ini menimbulkan sentimen negatif dari negara utamanya dari publik Korea Selatan. Survey yang dilakukan oleh Koran Donga di Korea Selatan tahun

¹ Hariska Farida dkk.2010.Koran Viva news terbitan 10 Agustus 2010."Dosa masa lalu,Jepang minta maaf ke Korsel" diakses dari di <http://www.vivanews.co.id/news/read/170165> pada 19 September 2019

1990 menyatakan bahwa 66% responden menyatakan tidak menyukai Jepang. Hasil serupa terus berlanjut hingga tahun 2005 dimana hasil survey menyatakan bahwa presentase ketidaksukaan publik Korea Selatan terhadap Jepang tetap konstan dan tinggi dengan nilai lebih dari 50%².

Seiring meluasnya ekspansi militer Jepang pada masa Perang dunia II selama tahun 1942-1945, Jepang menerapkan kebijakan rumah bordil militer. Kebijakan ini berkembang dari dalam Jepang sendiri hingga ke negara koloni termasuk Korea Selatan. Selain untuk memberikan izin istirahat bagi tentara militer Jepang, alasan pemerintah Jepang mendirikan rumah bordil yakni agar loyalitas tentara Jepang meningkat dan juga sebagai dalih bahwa akan lebih mudah bagi Jepang untuk mengatur penyebaran penyakit kelamin yang menjangkit para tentara. Hal ini dibenarkan oleh seorang ahli sejarawan bernama Yosiaki Yoshimi³.

Perbudakan seks tentara militer Jepang terhadap wanita-wanita Korea berawal pada saat Jepang menduduki Korea Selatan yang dimulai tahun 1910, Pemerintah Jepang melihat masalah mendesak yang bisa menjadi penyebab kekalahan Jepang dalam perang apabila tidak segera diatasi, yaitu kelemahan yang mulai ditunjukkan oleh tentara Jepang pada saat mereka mengalami stres akibat perang dan mereka pun melampiaskannya dengan cara memperkosakan wanita-wanita di Negara mereka pada

² Shin, G.-W., Sneider, D. C., & Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center. (2007). *Cross currents: Regionalism and nationalism in Northeast Asia*. Stanford, CA: Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center, Stanford University

³ Korean Times. 2007. *Comfort Women Used to Prevent Military Revolt During War*, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/10/117_14697.html, pada 19 September 2019

saat mereka mendapatkan kesempatan kembali beberapa saat kondisi perang terjadi⁴.

Dengan dasar inilah Pemerintah Jepang mulai membangun tempat rumah bordil khusus bagi tentara Jepang untuk memuaskan nafsu mereka, dengan menculik wanita dari berbagai Negara jajahannya seperti Korea Selatan, Taiwan, Filipina, China bahkan wanita-wanita dari Indonesia yang kemudian direkrut dan dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual kepada tentara Jepang. Fenomena perbudakan seks oleh militer Jepang tersebut kemudian dikenal dengan istilah *comfort system*.

Dari '*comfort system*' yang diberlakukan oleh Pemerintah Jepang pada masa kolonialisme tersebut kemudian muncul istilah *comfort women*. *Comfort women* merupakan istilah yang digunakan pada masa penjajahan Jepang untuk menyebut wanita-wanita muda yang berasal dari berbagai bangsa dan latar belakang sosial yang kemudian direkrut dan dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual terhadap tentara Jepang. Istilah tersebut diterjemahkan secara harfiah dari bahasa Jepang yaitu *Jugun Ianfu* yang diartikan sebagai para wanita yang memberikan kenyamanan atau hiburan bagi tentara Jepang di lokalisasi yang dibangun oleh Pemerintah Jepang yang kemudian disebut sebagai *comfort stations*. Lokalisasi tersebut berada di dalam barak-barak militer yang dibangun di sekitaran markas tentara Jepang selama perang Asia-Pasifik berlangsung.

Pada zaman kolonialisme Jepang, wanita-wanita asal Korea Selatan-lah yang paling diminati oleh tentara Jepang karena sebagian besar *Jugun Ianfu* asal Korea

⁴ NHK world news.Koran NHK World terbitan 28 Desember 2015.Bisa diakses di www.nhkworldnes.id pada 19 September 2019

Selatan mengerti dan bisa berbahasa Jepang dengan baik. Hal inilah yang kemudian memicu semakin banyaknya jumlah wanita asal Korea Selatan yang diculik untuk dijadikan *Jugun Ianfu*⁵. Tidak ditemukan data yang akurat terkait jumlah *ianfu* korban budak seks militer Jepang pada saat itu. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen yang menjelaskan jumlah tersebut. Namun terdapat beberapa ilmuwan yang memperkirakan jumlah *ianfu* sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah *ianfu* berdasarkan perkiraan ilmuwan

Nama Ilmuwan	Tahun Publikasi	Jumlah <i>Ianfu</i>
Ikuhiko Hata	1993	90.000
Yoshimi Yoshiaki	1995	200.000
Su Zhiliang	1999	360.000

Sumber: Asian Women's Fund

Dari beberapa perkiraan tersebut, data yang paling sering digunakan adalah data Yoshimi Yoshiaki yaitu sebanyak 200.000 orang *ianfu*. Jumlah ini juga digunakan oleh G. J. McDougal yang merupakan Pelapor Khusus Sub-Komisi PBB untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas dalam laporannya yang berjudul "Bentuk Perbudakan Kontemporer: Pemerkosaan Sistematis, Perbudakan Seksual dan Praktik Perbudakan Selama Konflik Bersenjata" tanggal 22 Juni 1998.

Dari Jumlah tersebut, Kim Il Myon (Penulis buku "*Tenno no Guntai to Chosenjin Ianfu*" atau "*The Emperor's Army and The Korean Comfort Women*") memperkirakan

⁵ Hendrajit, 2016. "*Analisis dalam Jugun Ianfu (Comfort Woman)*". The Global Review bisa diakses di www.theglobalreview.com/content-detail pada 19 September 2019

sebanyak 80 persen dari keseluruhan jumlah *ianfu* atau sekitar 160.000 *ianfu* berasal dari Korea⁶.

Kondisi kelam tersebut berakhir dan setelah sekian lama negara-negara bekas jajahan Jepang banyak yang menuntut tindakan asusila yang dilakukan oleh militer Jepang zaman dahulu. Salah satu negara yang gencar mendesak Pemerintah Jepang untuk mengatasi isu ini adalah Korea Selatan. Berawal dari perjuangan sekelompok individu yang menyebut diri mereka sebagai aktivis pembela hak-hak sipil Korea Selatan, isu ini semakin santer menyeruak di permukaan. Bahkan Amerika Serikat turut menekan kedua belah pihak (Korea Selatan dan Jepang) untuk menyelesaikan permasalahan pelik ini. Pada saat isu *comfort women* ini berkembang, terutama di Korea Selatan, Pemerintah Jepang beralih bahwa hal itu merupakan bentuk pelacuran dari para wanita yang bersedia memberikan dirinya dengan sukarela. Lebih lanjut, Pemerintah Jepang juga mengatakan bahwa wanita-wanita tersebut sengaja mempekerjakan diri sebagai pelacur dengan motif mencari keuntungan dan uang⁷.

Berdasarkan pengkajian mendalam, *comfort women* tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk pelacuran sebab terdapat tiga indikator yang tidak ditemukan dalam fenomena tersebut yaitu pembayaran, promiskuitas (hubungan seksual sesat yang dilakukan dengan siapa saja) dan ketidakterlibatan emosional⁸. Dengan demikian

⁶ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Number of comfort Stations and Comfort Women*. Diakses dari <http://www.awf.or.jp/el/facts-07.html> pada 19 September 2019

⁷ Jumaningsih, Maia. 1999. Dampak Kekerasan Seksual pada Jugun Ianfu. Yogyakarta: Ford Foundation PPK-UGM, Hlm. 6

⁸ Ibid.

dapat dikatakan bahwa *comfort women* benar-benar berbeda dengan pelacuran sebab mereka melayani kebutuhan seksual tentara Jepang bukan atas kemauan sendiri melainkan karena paksaan hingga penculikan dan penipuan. Oleh karena itu dunia mengecam beban masa lalu Jepang tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM berat yang tergolong dalam kekerasan seksual.

Dengan semakin banyaknya aktivitas dan massa yang menyuarakan hak-hak *comfort women*, hubungan Korea Selatan dan Jepang kembali memanas pada tahun 2011. Hal ini ditandai dengan didirikannya patung wanita yang merepresentasikan simbol *comfort women* di depan Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan. Pada tanggal 14 Desember 2011, para korban dan KCWS (*The Korean Council for The Women Drafted for Sexual slavery*) yang merupakan suatu bentuk *women redress movement* (dalam bahasa korea disebut sebagai Jeongdaehyeob) mendirikan patung Pyeonghwabi atau *Statue of Peace* sebagai personifikasi penderitaan para korban *comfort women system* dan ditempatkan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Tak hanya sebagai peringatan simbolis, patung ini menjadi pernyataan konfrontatif para korban bahwa pemerintah Jepang tak kunjung memenuhi tanggung jawabnya⁹.

Patung tersebut berupa seorang gadis duduk di kursi dan bertelanjang kaki dan memandang Kedubes Jepang sebagai perlambang seluruh *Jugun Ianfu* dari Korea¹⁰.

⁹ Korea Verband. 2017. *Die Freidenstatue*, diakses dari <http://www.koreaverband.de/trostfrauen/friedensstatue>, pada 19 September 2019

¹⁰ Amardhanu, Denny. 2015. Pertemuan Korsel-China-Jepang akan Bahas Jugun Ianfu. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030145533-113-88456/pertemuan-korsel-china-jepang-akan-bahas-jugun-ianfu>, pada 19 September 2019

Memori historis atas kekejaman zaman kolonial Jepang seperti isu *Text book* yang memuat materi historis yang diduga telah diubah esensinya oleh Jepang, isu masalah teritorial Dokdo-Takhesima serta yang paling pelik isu *comfort women*, telah menjadi hambatan besar terhadap hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Sejarah mencatat sejak Korea Selatan merdeka atas penjajahan Jepang pada tahun 1945, terdapat beberapa kali upaya kedua negara melakukan hubungan diplomasi. Hal ini tidak pernah benar-benar terwujud karena masih adanya isu historis diantara keduanya yang belum terselesaikan. Percobaan pertama untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara keduanya terjadi pada tahun 1965 dengan adanya perjanjian tentang hubungan dasar (*basic relations*) antara Jepang dan Korea Selatan. Pengangkatan isu *comfort women* pertama kali dilakukan pada tahun 1991 dimana pada saat itu mantan wanita penghibur zaman kolonial Jepang pertama kali berbicara di hadapan publik dan menentang Pemerintah Jepang. Semenjak mencuatnya isu tersebut, hubungan diplomatik antara kedua negara terekam sebagai berikut.

Selama bertahun-tahun hubungan Korea Selatan-Jepang tidak mengalami perkembangan yang signifikan hingga akhirnya isu *comfort women* kembali mencuat ke permukaan dengan adanya demonstrasi besar-besaran pada tahun 2011. Setelah selama kurang lebih 25 tahun menjadi perdebatan dan menjadi salah satu pembahasan penting dalam diskusi kedua negara, akhirnya Korea Selatan dan Jepang sepakat untuk menyelesaikan isu jugun ianfu di tahun 2015. Proses negosiasi yang panjang telah dialalui oleh kedua Negara hingga akhirnya mencapai kesepakatan tersebut.

Dengan adanya hal tersebut, hal ini menjadi pertanda awal proses rekonsiliasi antara

Korea Selatan-Jepang atas konflik *comfort women* diantara keduanya melalui *Agreement on Comfort Women 2015*.

Rekonsiliasi itu sendiri merupakan suatu konsep yang berupaya untuk membingkai ulang konflik sehingga para pihak tidak lagi sibuk dan terfokus pada masalah secara langsung¹¹. Rekonsiliasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang berusaha untuk mengubah kedengkian atau kekejaman yang melekat di antara pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam konflik atau perselisihan menjadi perasaan penerimaan dan bahkan pengampunan dari permusuhan masa lalu atau tindakan yang merugikan¹².

Tujuan dari adanya rekonsiliasi adalah untuk mencari cara-cara inovatif guna menciptakan waktu dan tempat bagi berbagai pihak atau tingkat populasi yang terkena dampak konflik serta untuk mengatasi, mengintegrasikan dan merangkul masa lalu yang menyakitkan guna menyambut masa depan bersama. Rekonsiliasi dapat melibatkan jalan lain menuju keadilan, khususnya di mana salah satu pihak telah menderita secara relatif terhadap atau di tangan pihak lain. Dengan demikian rekonsiliasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dicapai kedua belah pihak yang berkonflik. Setelah tercapai rekonsiliasi yang mendalam diantara kedua belah pihak, maka akan memberikan efek positif diantara pihak-pihak yang berselisih.

¹¹ Lederach, John Paul. 2002. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press. Hlm 35

¹² Christopher E. Miller. 2005. *A glossary of terms and concepts in peace and conflict studies second edition*. University for peace. Hlm 66

Sebagai contoh yang terjadi antara Korea Selatan-Jepang atas konflik *comfort women*. Dengan tercapainya rekonsiliasi yang terjadi diantara keduanya akan memungkinkan terbukanya hubungan diplomatik yang menguntungkan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam proses rekonsiliasi kedua negara tersebut, Amerika Serikat turut mendesak untuk kedua negara berdamai karena ada beberapa kepentingan politik yang mendasarinya.

Hal menarik seperti inilah yang kemudian ingin dijadikan urgensi dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat rekonsiliasi Korea Selatan-Jepang dalam menangani konflik *jugun ianfu* atau *comfort women* melalui *Agreement on Comfort Women* tahun 2015. Pasalnya, terdapat perubahan sikap Pemerintah Jepang terutama Perdana Menteri Shinzo Abe terhadap permasalahan *jugun ianfu* dengan Korea Selatan ini. Awalnya Perdana Menteri Shinzo Abe terkesan menentang pernyataan bahwa pihak militer Jepang terlibat langsung dan juga menggunakan kekerasan dalam perekrutan *jugun ianfu*, hingga kemudian sang Perdana Menteri setuju menandatangani *Agreement on Comfort Women* tahun 2015. Dengan demikian dapat diketahui proses rekonsiliasi Korea Selatan-Jepang atas konflik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis menganggap hubungan Korea Selatan dan Jepang terkait isu *jugun ianfu* ini menarik untuk diteliti. Oleh karena itu permasalahan yang kemudian muncul dan membutuhkan pengkajian mendalam adalah terkait “Bagaimanakah rekonsiliasi

Korea Selatan-Jepang dalam mengatasi konflik *Comfort Women* melalui *Agreement on Comfort Women* yang terjadi pada tahun 2015?”

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses rekonsiliasi Korea Selatan-Jepang dalam mengatasi konflik *comfort women* melalui *Agreement on Comfort Women* Tahun 2015

1.4 Manfaat Penelitian

- Harapannya, penelitian ini bisa memberikan sumbangsih bagi perkembangan studi Hubungan Internasional kedepannya.
- Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi serta bahan kajian bagi para pihak yang sedang melakukan studi Hubungan Internasional lainnya serta bagi pemerhati masalah-masalah internasional yang terkait dengan isu-isu sejenis.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ja-hyun Chun dan Youcheer Kim (2014) dalam *The Korea Journal of International Studies* dengan judul “A New Interpretation of Korea-Japan Relations: ‘Rights Revolution’ of Sex Slaves and Forced Laborers in the Courtroom”¹³. Penelitian ini dilakukan untuk meramalkan era baru seputar dinamika pertikaian dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang akibat adanya isu historis. Chun dan Kim dalam tulisannya menjelaskan siklus hubungan antara Korea Selatan dan Jepang dengan menggunakan *Competing and Alternative Theories* dengan *analytical framework* berupa ‘*inter-state reconciliation model*’. Menurut Chun dan Kim kerangka kerja analitik tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa Korea Selatan dan Jepang gagal mencapai tingkat rekonsiliasi mendalam terkait isu *comfort women* atau *sex slave victim* serta *forced laborer* yang terjadi di masa lalu.

Model tersebut dikembangkan karena menurut penulis tiga teori utama tentang *international relation* (*realism*, *liberalism*, *constructivism*) memiliki

¹³ Ja-hyun Chun & Youcheer Kim. 2014. *A New Interpretation of Korea-Japan Relations: ‘Rights Revolution’ of Sex Slaves and Forced Laborers in the Courtroom*. *The Korean Journal of International Studies* Vol.12-1 (June 2014), hal. 255-276. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.14731/kjis.2014.06.12.1.255>, tanggal 04 April 2019

keterbatasan dalam menjelaskan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. *Inter-state reconciliation* dapat didefinisikan sebagai ‘mengubah hubungan permusuhan antara dua negara yang berkonflik menjadi hubungan persahabatan yang harmonis diantara keduanya (Ackermann 1994: 229)¹⁴. Tingkat rekonsiliasi dapat diklasifikasi secara konseptual dari yang terlemah ke yang terkuat menurut tiga tingkat teori rekonsiliasi Crocker. Selain itu, proses rekonsiliasi juga dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahap dengan fokus utama dan agenda yaitu rekonsiliasi prosedural, material, dan ideasional. Dalam penelitian ini Chun dan Kim menganggap proses rekonsiliasi ideasional (*ideational reconciliation process*) paling relevan dengan bahasan tulisan mereka, dimana rekonsiliasi ini terjadi ketika pihak-pihak yang terkait tidak berusaha untuk mendistorsi atau menyembunyikan sisi gelap masa lalu dan mengalihkan hubungan mereka ke hubungan berorientasi masa depan¹⁵.

Temuan dalam penelitian Chun dan Kim (2014) menyatakan bahwa terdapat dua fase dalam *ideational reconciliation* yang dianggap cacat serta revolusi hak atas korban perbudakan seks dan korban perang. Fase pertama berawal dari segera setelah kemerdekaan Korea Selatan dan normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Sejak saat kritis tersebut, hubungan diantara kedua negara ditandai oleh dinamika politik atas masalah budak seks dan pekerja pusa pada zaman perang. Korea Selatan, sebagai negara kecil di bawah struktur Perang Dingin (*Cold War*) dan orang-orangnya di bawah pemerintahan diktator, telah sepenuhnya dikesualikan dari

¹⁴ Ibid, 259

¹⁵ Ibid, 261



wacana tentang reparasi dan terpinggirkan dalam proses rekonsiliasi dan proses normalisasi diplomatik. Proses rekonsiliasi prosedural yang cacat di tingkat internasional dan domestik, pada akhirnya merupakan akar penyebab mengapa para korban di bawah pemerintahan kolonial Jepang terpinggirkan secara politis, dan harus mengandalkan badan yuridis untuk revolusi hak-hak mereka melalui litigasi transnasional.

Hal ini ditandai pertama kali dengan tidak diundangnya Korea Selatan dalam Perjanjian Damai San Fransisco tahun 1952. Dengan demikian Korea Selatan kehilangan kesempatan yang sah untuk menekan Jepang dalam rangka melaksanakan rekonsiliasi ideasional. Setelah peristiwa ini terjadi, 14 tahun dialog panjang dan agenda diskusi bilateral diantara Korea Selatan dan Jepang tak kunjung selesai.

Pertemuan Pertama antara Korea Selatan dan Jepang pada 15 Februari 1952 menghasilkan ketidaksepahaman diantara keduanya. Dari sisi Korea Selatan menuntut negosiasi ditilik dari 'memperhitungkan masa lalu' namun Jepang bersikeras 'membangun hubungan baru' diantara mereka. Kemajuan penting hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang terjadi pada babak keenam dimana pada 12 November 1962. Ketua Badan Intelejen Pusat Korea Selatan, Kim Jong-Pil dan Meneteri Jepang, Masayoshi Ohira berkompromi tentang pembayaran ganti rugi perang dan status orang Korea Selatan. Pada saat itu kedua tokoh tersebut membetuk kerangka dasar perjanjian internasional tahun 1965¹⁶.

¹⁶ Ibid, 263

Berangkat dari hal tersebut kedua negara menandatangani Perjanjian Hubungan Dasar dan empat perjanjian tambahan, termasuk "Klaim Korea-Jepang dan Perjanjian Kerjasama Ekonomi" (selanjutnya disebut, Perjanjian Klaim). Artikel 1 Perjanjian Klaim menyatakan bahwa Jepang akan memberi Korea Selatan hibah \$ 300 juta dan batas kredit \$ 200 juta. Sebagai *quid pro quo*, Pasal 2 menegaskan bahwa "properti, hak, dan keuntungan antara Korea dan Jepang, serta klaim masalah yang terkait dengan kedua negara dan orang-orangnya telah sepenuhnya dan pada akhirnya diselesaikan.

Karena perjanjian tersebut tidak memerlukan permintaan maaf yang tulus dan juga tidak mengharapkan penyembuhan kepada para korban Korea Selatan yang menderita selama penjajahan brutal kolonial Jepang, perjanjian yang dianggap cacat tersebut mengipasi nasionalisme rakyat Korea Selatan, dan menghasilkan demonstrasi yang sangat kuat selama rezim Park Chung-hee. Untuk mengurangi ketidakpuasan, rezim Park mengesahkan undang-undang domestik untuk kompensasi bagi korban kerja paksa. Namun, secara administrasi Park hanya mendistribusikan 5% dari biaya penyembuhan yang diberikan oleh Jepang ke pekerja paksa Korea Selatan (MBC Documentary 2001)¹⁷. Para korban perbudakan seks dan kerja paksa, yang suaranya tidak terdengar di meja diplomatik, harus mengandalkan litigasi transnasional untuk melindungi hak kompensasi mereka dan pembangunan koalisi.

Di bawah politik rekonsiliasi yang cacat, yang mengesampingkan dan meminggirkan korban, satu-satunya tempat yang dapat diakses oleh orang-orang yang

¹⁷ Ibid, 264



terpinggirkan adalah sistem peradilan. Ada lebih dari 60 litigasi tentang masalah budak seks dan kerja paksa di pengadilan Jepang, dengan dukungan substansial dari Association of Attorneys Considering comensation Issues by Japan. Pada Desember 1991, ketika masalah perbudakan seks mulai dikenal di masyarakat Korea Selatan, Kim Hak-sun dan kedua korban lainnya mengajukan gugatan pertama terhadap pemerintah Jepang di Pengadilan Distrik Tokyo, Jepang. Pengadilan menolak kasus ini karena penghapusan klaim individu berdasarkan Perjanjian Klaim Korea-Jepang (Ishikane 2006)¹⁸. Setelah kasus ini banyak korban perbudakan seks Korea Selatan di masa penjajahan Jepang yang mengajukan gugatan permintaan maaf dan kompesasi kepada pengadilan Jepang. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Satu-satunya gugatan dari korban budak seks yang berhasil adalah dibawah pengadilan Shimonoseki (Pengadilan Distrik Jepang Yamaguchi 1998). Keputusan pengadilan menyatakan bahwa pemberian kompensasi merupakan tanggung jawab Jepang atas pelanggaran besar hak asasi manusia yang dilakukan tentara Jepang zaman penjajahan terdahulu.

Amerika Serikat selalu menjadi pihak ketiga yang relevan dalam proses rekonsiliasi Jepang-Korea Selatan semenjak Perjanjian Damai San Francisco dan Perjanjian Normalisasi Diplomatik. Hal ini dilakukan terutama dimotivasi oleh alasan keamanan, pemerintah AS telah lama berusaha untuk menekan ledakan antagonisme yang berlebihan dari Korea Selatan terhadap Jepang. Sementara itu AS juga membatasi ledakan berlebihan nasionalis Jepang, yang keduanya dapat

¹⁸ Ibid, 265

membahayakan segitiga kerja sama keamanan di Asia Timur Laut. Amerika Serikat memfasilitasi pembentukan koalisi politik untuk solusi dari dua masalah kritis dan memberikan tekanan kuat pada Pemerintah Jepang. Dewan Perwakilan AS, yang diusulkan oleh Anggota Kongres Michael M. Honda dari Hawaii, mengeluarkan Resolusi 121, yang menuntut agar pemerintah Jepang "secara resmi mengakui, meminta maaf, dan menerima tanggung jawab historis dengan cara yang jelas dan tegas atas pebudakan seks wanita saat zaman kekaisaran di Korea Selatan" (U.S. House Representatives 2007)¹⁹.

Fase kedua dalam *ideational reconciliation* ditandai dari desakan para korban dalam litigasi awal mereka di hadapan Mahkamah Instansi Korea agar pemerintah Korea Selatan lebih berani terutama untuk Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan. (MOFAT). Para korban menyatakan bahwa tindakan penghapusan beberapa item pada Perjanjian Klaim oleh pemerintah Korea Selatan secara signifikan melanggar hak konstitusionalnya untuk dilindungi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Bagian 2 dan Pasal 10. Secara khusus, pengacara untuk para korban menunjukkan bahwa Pasal 3 Perjanjian Klaim, yang mengatur pada penyelesaian sengketa melalui panel arbitrase jika ketidaksepakatan atas interpretasi tentang perjanjian terjadi, mewajibkan pemerintah Korea untuk menyediakan saluran penyelesaian. Sebagai interpretasi klaim Pemerintah otoriter Jepang, Perjanjian selalu menjadi penghalang dalam litigasi transnasional, menyediakan Yurisprudensi pemerintah Korea melalui saluran diplomatik adalah

¹⁹ Ibid, 269

langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah ini, serta rekonsiliasi ideasional antara Korea dan Jepang²⁰.

Lebih lanjut, Chun dan Kim (2014) menyimpulkan hasil penelitiannya tentang hubungan Korea Selatan Dan Jepang terkait isu budak seks dan kerja paksa yaitu bahwa negara tidak harus memonopoli proses rekonsiliasi ideasional atas revolusi hak-hak korban²¹. Bertentangan dengan prosedur dan proses rekonsiliasi material, konstituen negara berdaulat dalam hal ini rakyatnya, bermain peran penting dalam mencapai tingkat rekonsiliasi ideasional yang mendalam, terutama karena sifat-sifat rakyatnya. Para korban perbudakan seks dan kerja paksa, kelompok pendukung mereka, dan warga negara Korea yang penuh kasih, selalu menjadi kelompok hak veto terhadap kebijakan rekonsiliasi yang berpusat pada pemerintah Korea Selatan. Orang-orang ini, yang telah lama diabaikan dan terpinggirkan dalam politik Korea Selatan dan forum diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang, akhirnya berhasil mengikat sikap pemerintah Korea Selatan pada dua masalah sejarah kritis. Proses rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Jepang juga dianalisis di atas menunjukkan bahwa teori IR liberal perlu klaim yang lebih berkualitas, setidaknya untuk menjelaskan hubungan Korea-Jepang.

Berlawanan dengan ekspektasi euforia pada akhir 1990-an, transisi demokrasi Korea Selatan dan hubungan saling ketergantungan dalam segi sosial ekonomi antara kedua negara belum secara fundamental memperbaiki permusuhan rakyat Korea

²⁰ Ibid, 270

²¹ Ibid, 272

terhadap Jepang, yang tetap menjadi batu sandungan besar untuk mencapai tingkat rekonsiliasi ideasional yang dalam. Litigasi transnasional dan prestasi para korban di pengadilan Korea Selatan, meskipun patut dipuji hasil pada nilai nominal, secara substansial telah mempersempit ukuran *win-set* dalam forum diplomatik antara kedua negara. Kecuali pemimpin Korea Selatan dan Jepang jelas memahami ukuran sempit *win-set* pada isu-isu kritis dan mengambil tindakan rekonsiliasi, kebuntuan politik antara kedua negara kemungkinan akan tetap berlarut-larut.

Penelitian kedua yang digunakan dalam penelitian ini penelitian oleh Kangkyu Lee, A.B. (2017) yang berjudul *The Comfort Women Agreement: An Analysis of The Motivations That Led to Park Geun-Hye's Acquiescence*²². Sejak normalisasi pada tahun 1965, hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan telah terus-menerus terperosok dalam kepahitan historis. Namun, pada Desember 2015, Korea Selatan dan Kementerian Luar Negeri Jepang mewujudkan kesepakatan yang tak terduga dan mendadak yang berusaha menyelesaikan masalah pelik terkait *comfort women*. Dalam penelitian ini akan dibahas dua penjelasan alternatif yang saling melengkapi dalam bentuk prospek keamanan dan ekonomi untuk menjelaskan sikap Korea Selatan terhadap Jepang atas kesepakatan yang telah ditandatangani pada 2015.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan realis untuk melihat dari sisi keamanan dalam proses kebijakan *comfort women* antara Korea Selatan dan Jepang.

²² Lee, Kangkyu, 2017. *The Comfort Women Agreement: An Analysis of The Motivations That Led to Park Geun-Hye's Acquiescence*. A Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington, DC.

Pendekatan ini berpendapat bahwa tingkat kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang berkorelasi dengan tingkat ancaman eksternal. *Quasi-alliance model* oleh Victor Cha digunakan dalam penelitian ini yang memanfaatkan ketakutan jebakan dan pengabaian sebagai variabel utama yang menjelaskan Perilaku Korea Selatan dan Jepang dan kaitannya dengan desakan Amerika Serikat.

Penelitian oleh Kangkyu Lee, A.B. (2017) ini menunjukkan bahwa tidak ada rekonsiliasi 'final' pada masalah sejarah di masa lalu. Terlepas dari semua faktor yang melandasi keputusan Korea Selatan dalam kesepakatan terkait *comfort women*, perjanjian itu merupakan perwujudan kepemimpinan unik dari presiden Park Geun-hye. peneliti berpendapat bahwa 'bayangan' kepemimpinan Park Chung-hee sebelumnya telah membuat kesan abadi pada kepemimpinan presiden Park Geun-hye karena gaya kepemimpinan ayahnya yang kuat dan berani serta peran konsekuen yang dia mainkan selama normalisasi Jepang-ROK.

Secara empiris, kepemimpinan Korea Selatan telah dipengaruhi oleh konteks gaya kepemimpinan Jepang dan Cina. Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa sikap Park Geun-hye dan kebijakan yang dibuatnya adalah produk sampingan dari lingkungan yang dibuat dan ditinggalkan oleh Park Chung-hee. Hal ini menjadikannya dapat mencapai kebijakan terkait perjanjian *comfort women* dengan Jepang yang merupakan hasil dari pengalaman dan pola pikir unik Park Geun-hye.

Selain itu dari prospek ekonomi, meningkatnya konsumsi domestik, permintaan energi, dan pertumbuhan yang dapat ditentukan, ada kebutuhan yang meningkat untuk negara-negara Asia Timur Laut untuk bersatu demi keuntungan bersama telah menjadi salah satu alasan presiden Park Geun-hye untuk mencapai

perjanjian *comfort women*. Integrasi regional yang lebih dekat adalah kunci untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk Korea Selatan dan Jepang, perjanjian atas *comfort women* menghadirkan jalan yang memfasilitasi kerja sama ekonomi yang lebih kuat. Karena hal inilah presiden Park Geun-hye mengejar berbagai macam pihak untuk menyelesaikan perjanjian terkait *comfort women* tersebut.

Selanjutnya, dari kedua jurnal yang digunakan dalam penelitian ini akan disajikan rangkuman tentang studi terdahulu dalam bentuk tabel. Tabel berikut akan menguraikan persamaan dan perbedaan substansi jurnal yang dipakai dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Selain itu disertakan pula kontribusi yang telah diberikan kedua jurnal bagi penelitian ini.

Tabel 2.1: Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Substansi Studi Terdahulu

Judul	Persamaan	Perbedaan
<i>A New Interpretation of Korea-Japan Relations: 'Right Revolution' of Sex Slaves and Forced Laborers in the Courtroom</i>	Studi terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas proses rekonsiliasi Korea Selatan-Jepang atas isu <i>comfort women</i> yang hingga saat ini masih membayangi hubungan bilateral kedua negara	Studi terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan pada teori dan konsep dalam proses analisis. Studi terdahulu menggunakan <i>Competing and Alternative Theories</i> dengan model <i>identional</i>



	tersebut dalam berbagai aspek.	<i>reconciliation process</i> dalam melihat dinamika hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang akibat adanya isu <i>comfort women</i> atau <i>sex slaves</i> .
<i>The Comfort Women Agreement: An Analysis of The Motivations That Led to Park Geun-Hye's Acquiescence</i>	Sama-sama melihat proses rekonsiliasi Korea Selatan-Jepang dalam mencapai kesepakatan dalam perjanjian <i>comfort women</i> .	Alat analisis yang digunakan berupa dua alternative yaitu dilihat dari prospek keamanan dan ekonomi. Dimana <i>Quasi-alliance model</i> oleh Victor Cha digunakan dalam penelitian tersebut.

2.2 Kerangka Konseptual

Dasar dari kajian politik luar negeri adalah pertanyaan *'how and why do national actors perform as they do in international relations?'*²³. Dari setiap kebijakan maupun langkah politik yang ditempuh oleh aktor politik maupun Negara pasti memiliki tujuan, latar belakang maupun kepentingan yang mendasarinya.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis proses rekonsiliasi antara Korea Selatan

²³ Charles a. McClelland. 1986. Ilmu Hubungan Internasional: Teori Dan Sistem. Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 166.



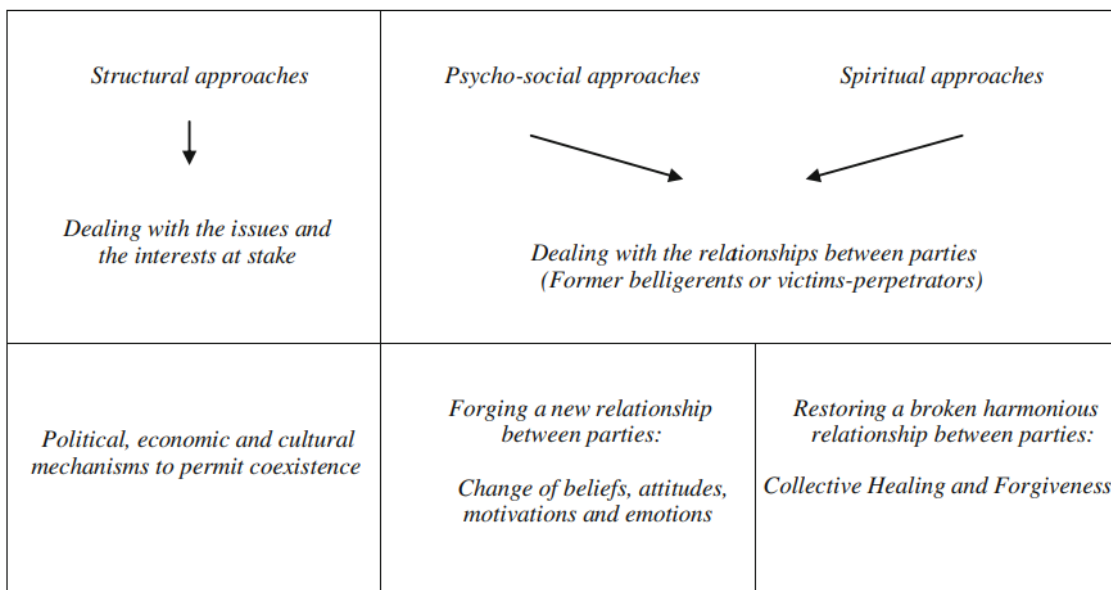
dan Jepang atas isu historis yang selama ini mengganjal diantara keduanya yaitu melalui *Agreement on Comfort Women* tahun 2015. Dimana diketahui bersama bahwa isu *comfort women* telah menjadi isu serius diantara kedua Negara serta menghambat hubungan diplomatik keduanya selama bertahun-tahun.

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai proses rekonsiliasi Korea Selatan dan Jepang atas konflik *comfort women* pada masa kolonial Jepang melalui kesepakatan *Agreement on Comfort Women* tahun 2015, dalam penelitian ini akan digunakan konsep puzzle rekonsiliasi yang dikemukakan oleh Valerie Rosoux (2017). Lebih lanjut, akan dijelaskan pula seberapa dalam proses rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Jepang melalui tiga tingkat teori rekonsiliasi yang dikemukakan oleh Crocker (1999). Rosoux berpendapat bahwa terdapat tiga puzzle yang dapat membentuk proses rekonsiliasi politik antar negara yaitu sebagai berikut²⁴:

- a. *Structures and institutions*, pendekatan ini memprioritaskan keamanan, saling ketergantungan ekonomi dan kerjasama politik antar partai
- b. *Relationships*, pada tahap ini menggarisbawahi aspek kognitif dan aspek emosional dari proses pemulihan hubungan antara mantan musuh
- c. *Spiritual*, tahap terakhir ini menekankan proses penyembuhan kolektif berdasarkan rehabilitasi korban dan pelaku.

Singkatnya, pendekatan struktural umumnya berkaitan dengan kepentingan dan masalah yang dipertaruhkan, sedangkan dua pedekatan lainnya berkonsentrasi pada hubungan antara para pihak.

²⁴ Valerie Rosoux. 2017. *Negotiating Reconciliation in Peacemaking* © Springer International Publishing AG. DOI 10.1007/978-3-319-62674-1_2, hlm 16



Gambar 2.1 Three Major Pieces of The Puzzle Of Reconciliation
Valerie Rosaux (2017)

Konsep rekonsiliasi yang dikemukakan oleh Valerie Rosoux (2017) diatas selaras dengan pendapat Crocker tahun 1999 dalam tiga tingkat teori rekonsiliasi Crocker. Tingkat rekonsiliasi dapat secara konseptual diklasifikasikan dari yang terlemah ke yang terkuat²⁵. Tingkat yang paling dangkal, dalam klasifikasi Crocker, ada ketika tidak ada lagi cedera atau pembunuhan antara pihak yang bermusuhan dan hukum dasar yang diamati. Tingkat menengah dari rekonsiliasi dapat diamati ketika dua pihak saling mengenali dan menghormati satu sama lain meskipun masih ada perbedaan dan konflik. Pada tahap ini, kedua pihak dapat saling memahami melalui dialog, dan mulai melakukan negosiasi di bidang yang menjadi kepentingan bersama.

²⁵ Crocker, David A. 1999. *Reckoning with Past Wrongs: A Normative Framework*. *Ethics & International Affairs* 13(1), 43-64.



Tingkat rekonsiliasi terdapat dapat diamati ketika dua pihak berbagi visi yang luas, saling perlakuan, pemulihan, dan pengampunan.

Telah banyak ahli yang mendefinisikan proses rekonsiliasi, menurut Lederach rekonsiliasi disebut sebagai suatu konsep yang berupaya untuk meringkai ulang konflik sehingga para pihak tidak lagi sibuk dan terfokus pada masalah secara langsung²⁶. Tujuan dari adanya rekonsiliasi menurut Lederach adalah untuk mencari cara-cara inovatif guna menciptakan waktu dan tempat bagi berbagai pihak atau tingkat populasi yang terkena dampak konflik serta untuk mengatasi, mengintegrasikan dan merangkul masa lalu yang menyakitkan guna menyambut masa depan bersama.

Rekonsiliasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang berusaha untuk mengubah kedengkian atau kekejaman yang melekat di antara pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam konflik atau perselisihan menjadi perasaan penerimaan dan bahkan pengampunan dari permusuhan masa lalu atau tindakan yang merugikan²⁷.

Rekonsiliasi dapat melibatkan jalan lain menuju keadilan, khususnya di mana salah satu pihak telah menderita secara relatif terhadap atau di tangan pihak lain. Dalam kasus seperti itu, kompensasi untuk korban mungkin ditawarkan sebagai emolien.

Jika disodorkan secara sensitif, kompensasi memiliki kapasitas penyembuhan yang luar biasa untuk pihak yang terluka serta bagi pelaku tindakan berbahaya.

²⁶ Lederach, John Paul. 2002. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press. Hlm 35

²⁷ Christopher E. Miller. 2005. *A glossary of terms and concepts in peace and conflict studies second edition*. University for peace. Hlm 66

Agar rekonsiliasi berkembang menjadi budaya damai, mantan musuh harus mengembangkan hubungan kerja sama satu sama lain dan mengelola konflik mereka yang tak terhindarkan secara konstruktif. Dari perspektif psikologis, hal ini membutuhkan beberapa basis penting berikut²⁸:

a. *Mutual knowledge*

Rival masa lalu harus mendapatkan pengetahuan tentang satu sama lain. Hal ini mencakup ruang lingkup pengetahuan yang luas yaitu mencakup berbagai domain, seperti budaya, agama, sosial, politik, geografis atau historis. Pengetahuan itu penting untuk pengembangan budaya perdamaian atas ketidaktahuan dan terdistorsi atau informasi selektif yang sering menjadi penyebab permusuhan, prasangka dan kebencian.

b. *Mutual acceptance*

Kedua belah pihak harus saling menerima baik secara pribadi maupun tingkat nasional. Ini berarti saling inklusi, legitimasi dan humanisasi. Penerimaan bersama adalah syarat untuk mengembangkan hubungan yang kooperatif dan ramah. Membangun dan memelihara hubungan yang saling percaya adalah aspek kunci dalam *mutual acceptance*. Hal ini berfungsi sebagai dasar untuk membangun keberadaan yang aman di wilayah yang sangat luas artinya untuk setiap kelompok, yang merupakan kondisi yang diperlukan untuk menstabilkan perdamaian.

²⁸ Daniel Bar-Tal. 2008. *Reconciliation as a Foundation of Culture of Peace. Handbook on Building Cultures of Peace* © Springer Science + Business Media, LLC, hlm 370

c. *Mutual understanding*

Selain mengetahui dan menerima, kedua belah pihak harus saling memahami dengan mengembangkan empati dan kepekaan satu sama lain atas kebutuhan, nilai, tradisi, dan pengalaman. Pemahaman seperti itu mencegah banyak konflik karena kedua belah pihak menyadari bahwa hubungan mereka diatur dengan motif campuran sehingga konflik dapat menyebabkan kedua belah pihak kehilangan hal tersebut.

d. *Respect for differences and focus on commonalities*

Budaya damai sama-sama menghargai pluralisme dan perbedaan, dan menekankan kesamaan dan konstruksi dengan tujuan yang sama. Semua pihak harus mencari kesamaan serta mengidentifikasi dan menghormati perbedaan. Penghormatan ini memberikan jaminan yang diperlukan untuk eksistensi aman identitas masing-masing pihak, suatu kondisi untuk koeksistensi damai. Setiap kelompok harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk kebutuhannya untuk memegang identitas kolektifnya.

e. *Development of cooperative relations*

Perkembangan hubungan kerja sama berlaku terutama pada sisi struktural dan budaya perdamaian yang konkret. Kerjasama ini memiliki ruang lingkup tidak terbatas karena dapat menjadi bagian dari ekonomi, politik, budaya, hubungan militer, pendidikan dan lingkungan. Yang paling penting adalah mekanisme kerja sama militer dan keamanan yang menjaga hubungan damai dan mencegah kesalahan persepsi dan kesalahpahaman.

f. *Valuing peace*

Sangat penting bahwa perdamaian menjadi nilai tertinggi. Semua pihak harus melihat kedamaian sebagai nilai yang diinginkan dan penting, dan sebagai tujuan super-ordinat. Itu harus dipandang secara konkret dan relevan, yaitu, sebagai tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Selain itu, perlu untuk membangun moral yang sama serta menjaga perdamaian dan memberikan ini kepada generasi baru.

g. *Mechanisms for maintaining peace*

Budaya damai sangat menekankan mekanisme yang memungkinkan untuk pemeliharaan perdamaian. Ini membutuhkan pengembangan berbagai jenis institusi, organisasi, pertukaran koperasi, dan sebagainya yang bermaksud untuk memperkuat dan mengkristalisasi hubungan damai. Apalagi pengembangan budaya membutuhkan pembangunan narasi, simbol dan ritual baru guna menjelaskan, mempertahankan, membenarkan, dan bahkan memuliakan perdamaian. Yang paling penting adalah membangun pendidikan perdamaian berkelanjutan yang dapat mensosialisasikan generasi muda ke dalam budaya damai. Media massa memiliki peran dan misi dalam menjaga perdamaian. Hal ini juga berlaku untuk berbagai saluran budaya, seperti sastra, film, atau drama teater.

2.3 Definisi Konseptual

Rekonsiliasi sering dianggap penting untuk menciptakan kondisi bagi resolusi dan stabilitas yang tahan lama, terutama karena trauma kekerasan yang luas sering kali diturunkan ke generasi mendatang, berkontribusi pada siklus kekerasan retribusi

yang terus-menerus. Dalam hal ini, rekonsiliasi diperlukan tidak hanya untuk penyembuhan psikologis atau sosial, tetapi juga untuk stabilisasi politik atau pembaruan dalam mengejar tujuan atau cita-cita yang lebih luas²⁹.

Penelitian ini menggunakan konsep puzzle rekonsiliasi yang dikemukakan oleh Valerie Rosoux. Menurut Valerie Rosoux terdapat tiga puzzle penting dalam proses rekonsiliasi politik antar negara³⁰. Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap rekonsiliasi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Structure and Institutions

Setelah penghentian tindakan kekerasan atau konflik yang terjadi, pihak-pihak yang berkonflik dapat saling membangun mekanisme struktural dan institusional yang diterima untuk mengurangi persepsi umum, mengancam dan untuk menyelesaikan segala ketidaksepakatan yang mungkin terjadi. Ketika mantan pejuang tinggal di negara bagian yang berbeda, mekanisme ini dapat mengambil langkah membangun kepercayaan seperti bertukar perwakilan di berbagai politik, bidang ekonomi, dan budaya; memelihara saluran komunikasi dan konsultasi formal dan reguler antara pejabat publik; mengembangkan institusi bersama dan organisasi untuk merangsang saling ketergantungan ekonomi dan politik; serta mengurangi ketegangan akibat pelucutan senjata, demobilisasi pasukan militer dan demiliterisasi wilayah.

b. Relationships

²⁹ Christopher E. Miller. 2005. *A glossary of terms and concepts in peace and conflict studies second edition*. University for peace.

³⁰ Valerie Rosoux. 2017. *Negotiating Reconciliation in Peacemaking* © Springer International Publishing AG. DOI 10.1007/978-3-319-62674-1_2, hlm 16

Meskipun beberapa perubahan struktural dapat diimplementasikan relatif cepat, pada akhir konflik transformasi hubungan tidak terjadi dengan cara yang sama.

Banyak penelitian yang didedikasikan untuk proses yang lambat dan sulit antara mantan negara yang berperang atau berkonflik atau antara korban dan pelaku. Mereka sering saling berhubungan tetapi visi mereka tentang proses transformasi berbeda.

Pendekatan Kognitif dan psiko-sosial menganalisis apa yang mereka sebut dengan "perubahan mendalam" dalam psikologi public. Evolusi ini dihasilkan dari proses penyesuaian timbal balik dalam keyakinan, sikap, motivasi dan emosi yang dimiliki oleh mayoritas anggota masyarakat. Dari perspektif itu, tujuan yang ditempuh oleh proses rekonsiliasi adalah untuk menjalin hubungan baru antara para pihak yang sebelumnya berkonflik.

c. *Spiritual*

Pendekatan spiritual berusaha memahami bagaimana *parties* dapat memulihkan hubungan harmonis yang rusak antara para pihak yang berkonflik. Mereka maju selangkah lebih lanjut dengan menyatakan bahwa upaya rekonsiliasi mengarah pada pengampunan kesalahan musuh (*rival*). Semangat rekonsiliasi ini tidak hanya dibuat oleh para teolog dan sarjana, tetapi juga oleh para pembuat kebijakan. Mantan Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle, misalnya sering menyebut "roh" ini sebagai asal rasa saling percaya yang memungkinkan integrasi Eropa.

2.4 Operasionalisasi Konsep

Konsep dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang Korea Selatan dan Jepang sebagai negara yang berkonflik atas isu wanita penghibur *ianfu* selama Perang Dunia II yang dilakukan oleh militer Jepang di Korea Selatan. Dengan demikian dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai proses rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Jepang atas isu tersebut melalui kesepakatan *Agreement on Comfort Women* Korea Selatan-Jepang tahun 2015. Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Jepang melalui *Agreement on Comfort Women* 2015 adalah konsep puzzle rekonsiliasi oleh Valerie Rosoux (2017). Selengkapnya akan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3: Operasionalisasi Konsep Rekonsiliasi Korea Selatan-Jepang dalam Konflik Terkait *Comfort Women*

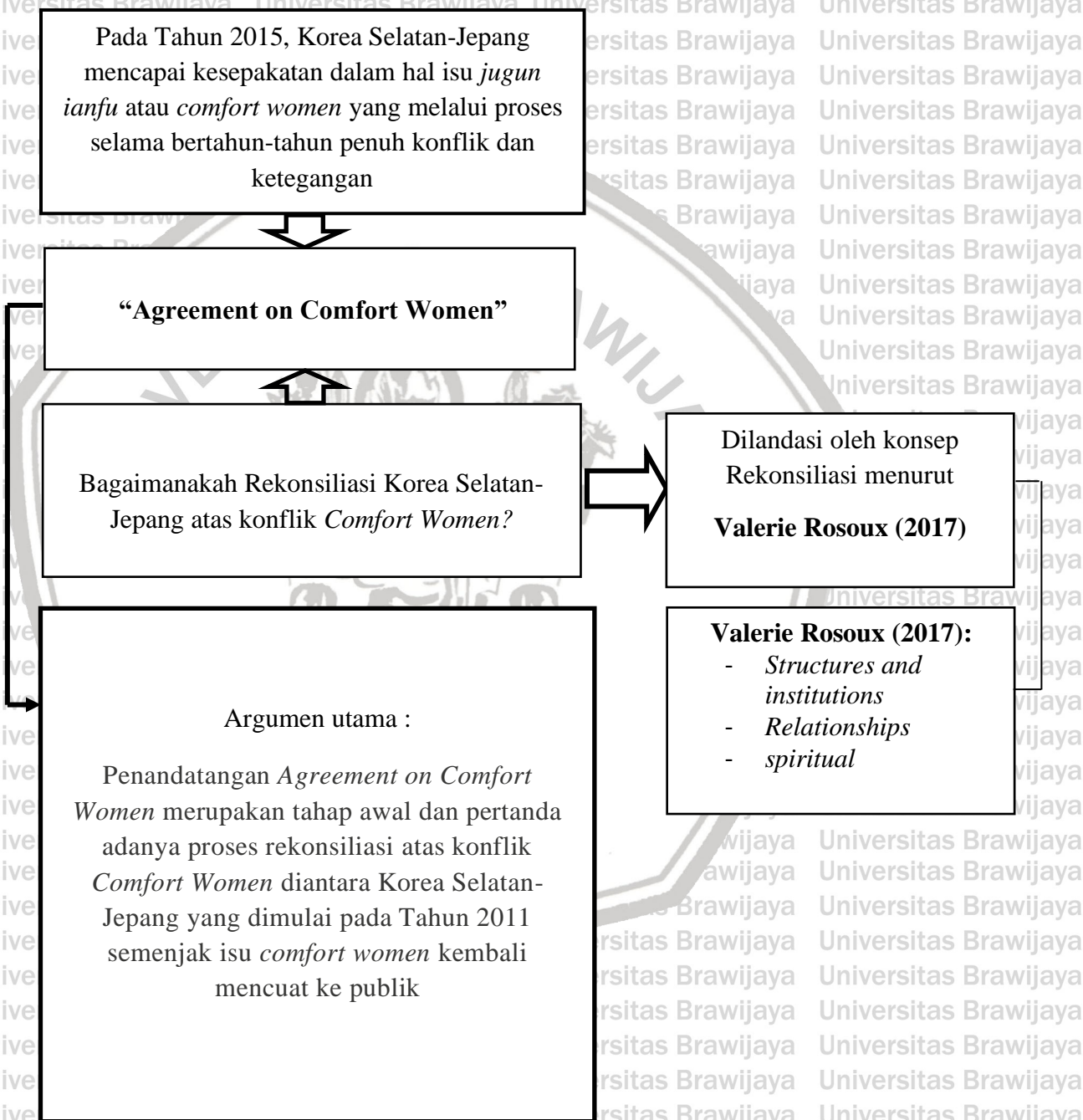
Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Konsep Puzzle Rekonsiliasi oleh Valerie Rosoux 2017	<i>Structures and institutions</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bertukar perwakilan di bidang ekonomi dan budaya - Saling ketergantungan di bidang ekonomi dan politik 	Upaya rekonsiliasi yang ditandai dengan adanya peningkatan pada 4 aspek utama yaitu ekonomi, budaya, politik dan keamanan. Dalam bidang ekonomi dan budaya terlihat dengan adanya proses pertukaran perwakilan antara Korea Selatan dan Jepang. Selain itu juga ditandai dengan adanya peningkatan keamanan, ketergantungan ekonomi maupun kerjasama di bidang politik diantara Korea Selatan-Jepang
	<i>Relationships</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek emosional dalam menghadapi potensi konflik atau permasalahan yang kemudian muncul 	Upaya rekonsiliasi yang ditandai dengan adanya pemulihan aspek emosional dan kognitif diantara Korea Selatan-Jepang, dalam artian baik Korea

		diantara kedua negara	Selatan maupun Jepang lebih tenang dan tidak mudah tersulut emosi yang tidak perlu dalam menanggapi-potensi konflik atau permasalahan yang muncul dikemudian hari setelah keduanya memutuskan berdamai terkait isu <i>comfort women</i>
	<i>Spiritual</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi korban konflik antara kedua negara - Pemberian kompensasi bagi korban konflik 	Upaya rekonsiliasi yang ditandai dengan adanya upaya rehabilitasi korban dan pelaku konflik diantara Korea Selatan-Jepang. Dalam hal ini korban yang dimaksud adalah mantan budak seks atau <i>comfort women</i> dari Korea Selatan selama masa penjajahan Jepang. Proses rehabilitasi tersebut berupa pembinaan mental para eks <i>comfort women</i> untuk <i>trauma healing</i> maupun pemberian kompensasi berupa sejumlah uang dari pemerintah Jepang

Sumber: Valerie Rosoux (2017)



2.5 Alur Pemikiran



2.6 Argumen Utama

Penandatanganan *Agreement on Comfort Women* merupakan gerbang pertama hubungan diplomatik Korea Selatan-Jepang setelah bertahun-tahun berkonflik dan terganjal isu historis pada masa penjajahan militer Jepang pada PD II di Korea

Selatan. Hal ini juga sebagai tahap awal dan pertanda adanya proses rekonsiliasi atas konflik *Comfort Women* diantara Korea Selatan-Jepang yang dimulai pada

Tahun 2011 semenjak isu *comfort women* kembali mencuat ke publik. Dimana, selama bertahun-tahun, Pemerintah Korea Selatan telah berulang kali mendesak dan meminta Jepang meminta maaf secara tulus serta memberikan kompensasi

kepada mantan wanita penghibur 'ianfu' Korea yang masih hidup dan kini berusia

80 atau 90 an tahun. Diperkirakan lebih dari 200.000 perempuan di seluruh wilayah pasifik dipaksa menjadi budak seks oleh militer Jepang semasa

penjajahan Jepang di Asia dan semasa Perang Dunia II. Pada November 2015,

pemerintah Korea Selatan dan Jepang telah mengadakan pertemuan bilateral

pertama untuk membahas isu pelik ini secara langsung. Saat itu kedua belah pihak

berjanji untuk meraih kesepakatan sebelum akhir tahun 2015 yang menandai 50

tahun dimulainya kembali hubungan diplomatik regional diantara keduanya.

Penyelesaian isu penting ini dan penandatanganan *Agreement on Comfort Women*

merupakan suatu tahap awal proses rekonsiliasi atas konflik tersebut antara Korea

Selatan-Jepang setelah bertahun-tahun terganjal masalah historis untuk menjalin

hubungan diplomatik dan kerjasama dalam berbagai bidang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif, artinya menggunakan satu variabel judul (x) dan memakai argumen utama sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah yang diajukan. Dilihat dari sisi eksistensi variabel, penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel yang data-datanya sudah ada tanpa proses manipulasi (data masa lalu dan sekarang). Dilihat dari sisi penyampaiannya, penelitian deskriptif dibuat untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya³¹.

Sehingga untuk penelitian ini akan dimulai dari penggambaran latar belakang isu wanita penghibur 'ianfu' diantara keduanya. Kemudian akan dijabarkan proses rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Jepang terkait isu 'ianfu'. Sehingga nantinya akan masuk dalam kesimpulan yang konkret sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana rekonsiliasi Korea Selatan-Jepang dalam konflik *comfort women* dengan ditandai perjanjian *Agreement on Comfort Women* pada tahun 2015.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

³¹ Muhammad Rasid Ridho, *Metode Penelitian: Jenis Penelitian*, 26 Oktober 2015, diakses dari <http://emerger.com/metode-penelitian-jenis-penelitian/> pada 19 Desember 2018.



Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembatasan periode pengamatan atas waktu terjadinya peristiwa atau objek yang dianalisis. Batasan waktu yang ditentukan adalah pada tahun 2011 yang merupakan tahun dimana isu *comfort women* kembali mencuat di publik Korea Selatan hingga tahun 2019.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah kepustakaan atau *library research*. Sumber-sumber referensi penelitian didapat melalui buku-buku, jurnal, serta sumber-sumber lain melalui internet. Mayoritas data-data sumber yang didapat merupakan data sekunder yang berarti informasi didalamnya didasarkan pada temuan-temuan yang dihasilkan oleh pihak lain berupa buku yang ditulis oleh para ahli maupun jurnal tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Serta sumber-sumber dari internet yang telah dituliskan sebelumnya oleh peneliti terdahulu³².

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses, suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang

³² Mohammad Mulyadi, *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol.16 No.1 (Januari-Juni 2012), hlm 77.

beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya³³.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi³⁴.

Dengan demikian proses pengolahan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber dari sampel informan/subjek/sasaran yang paling dirasa cocok dan relevan dengan isu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Informasi-informasi penting, fakta, serta bukti-bukti yang mendukung analisis penelitian telah disusun sedemikian rupa guna mendukung penjelasan fenomena yang dikaji.

3.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal penelitian ini dilakukan dalam 3 bab. Dimana sistematikanya telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan “Sistematika Penulisan

³³ Komariah, A. Satori, D. 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.

³⁴ Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Skripsi Program Studi Hubungan Internasional FISIP – Universitas Brawijaya”.

Didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang mana di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang penelitian berupa isu permasalahan yang diangkat atau gambaran fenomena awal yang selanjutnya disertai pula dengan urgensi penelitian. Selain itu disampaikan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN yang mana isinya berkaitan dengan studi terdahulu yang digunakan sebagai dasar perbandingan bagi penelitian penulis. Studi terdahulu ini berisi tentang teori yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya akan dipaparkan definisi konseptual dan juga operasionalisasi konsep yang berisi indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisis topik-topik dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN berisikan mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun subbab didalamnya antara lain jenis penelitian, ruang lingkup, teknik pengumpulan data, teknik analisa, dan sistematika penulisan.

BAB IV COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN yang mana di dalamnya menjelaskan tentang sejarah *comfort women* di Korea Selatan, pandangan Korea Selatan dan Jepang dalam isu *comfort women* serta akan dibahas terkait *agreement on comfort women* tahun 2015 yang merupakan perjanjian untuk menyelesaikan konflik *comfort women* diantara Korea Selatan dan Jepang yang berlarut-larut.

BAB V PEMBAHASAN yang mana isinya berkaitan dengan penjabaran proses rekonsiliasi Korea Selatan-Jepang atas isu *comfort women* setelah adanya *agreement on comfort women* tahun 2015. Penjabaran proses rekonsiliasi menggunakan konsep *puzzle rekonsiliasi* yang dikemukakan oleh Valerie Rosoux (2017).

BAB VI PENUTUP berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran dari peneliti terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah *Comfort Women* di Korea Selatan

Semenanjung Korea secara resmi menjadi bagian dari koloni Jepang pada tahun 1910, lima tahun setelah kemenangan Jepang dalam Perang Rusia-Jepang.

Ketika pertama kali datang, Jepang mengambil hati rakyat Korea dengan menyangand prinsip *Naeseon Ilche* yang berarti Joseon dan Jepang merupakan satu kesatuan. Prinsip ini sejatinya hanya untuk menipu rakyat Korea saja karena pada akhirnya Jepang menjadikan semenanjung Korea hanya sebagai objek dari kekaisaran Jepang. Dalam hal memodernisasi Korea, jumlah usaha dan pengeluaran sangat besar yang harus disisihkan oleh Jepang.

Usaha memodernisasi Korea tersebut dilakukan dengan membangun sistem medis, polisi dan militer serta membangun fondasi masyarakat Korea saat itu.

Pemerintahan kolonial Jepang berbeda dari kolonial barat. Dimana pada kolonial barat terjadi perbedaan ras atau dengan kata lain didasarkan pada supremasi rasial.

Sedangkan pada masa kolonial Jepang orang Korea tidak diperlakukan di bawah Jepang. Melainkan mereka memerintah, seolah-olah mereka adalah orang yang sama,

ras yang sama. Orang Jepang dan ras Korea diperlakukan sama dan Korea diperlakukan sebagai warga negara Jepang. Itulah mengapa orang Korea tampak

menyukai dan menerima keberadaan orang-orang Jepang pada masa kolonial tersebut³⁵.

Perbudakan seks tentara militer Jepang terhadap wanita-wanita Korea berawal pada saat Jepang menduduki Korea Selatan yang dimulai tahun 1910, Pemerintah Jepang melihat masalah mendesak yang bisa menjadi penyebab kekalahan Jepang dalam perang apabila tidak segera diatasi, yaitu kelemahan yang mulai ditunjukkan oleh tentara Jepang pada saat mereka mengalami stres akibat perang dan mereka pun melampiaskannya dengan cara memperkosakan wanita-wanita di Negara mereka pada saat mereka mendapatkan kesempatan kembali beberapa saat kondisi perang terjadi³⁶.

Alasan pemerintah Jepang mendirikan rumah bordil yakni agar loyalitas tentara Jepang meningkat dan juga sebagai dalih bahwa akan lebih mudah bagi Jepang untuk mengatur penyebaran penyakit kelamin yang menjangkit para tentara. Hal ini dibenarkan oleh seorang ahli sejarawan bernama Yosiaki Yoshimi³⁷.

Dengan dasar inilah Pemerintah Jepang mulai membangun tempat rumah bordil (selanjutnya dikenal sebagai *comfort station*) khusus bagi tentara Jepang untuk memuaskan nafsu mereka, dengan menculik wanita dari berbagai Negara jajahannya seperti Korea Selatan, Taiwan, Filipina, China bahkan wanita-wanita dari Indonesia

³⁵ Henry Scott Stokes. 2014. *Fabricating Historical Facts by Published by the Society for the Dissemination of Historical Fact*

³⁶ NHK world news. Koran NHK World terbitan 28 Desember 2015. Bisa diakses di www.nhkworldnews.id pada 19 September 2019

³⁷ Korean Times. 2007. *Comfort Women Used to Prevent Military Revolt During War*, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/10/117_14697.html, pada 19 September 2019

yang kemudian direkrut dan dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual kepada tentara Jepang. Menurut Center for Research on Globalization, *comfort station* ini dibangun sendiri oleh militer Jepang. Dari sini, militer Jepang membentuk pula berbagai kebijakan, harga, struktur, jadwal. Selama Perang Asia dan Pasifik (1937-1945), pemerintah Jepang mengerahkan sekitar 200.000 perempuan Asia ke rumah bordil militer untuk melayani tentara Jepang secara seksual. Mayoritas korban ini adalah wanita muda yang belum menikah dari Korea, koloni Jepang pada waktu itu³⁸.

Bahkan militer Jepang juga menyediakan dokter untuk memeriksa wanita-wanita tersebut secara berkala dan memastikan mereka bebas dari penyakit menular seksual.

Selama perang Sino-Jepang, wanita Korea dengan wanita Jepang dikirim ke stasiun kenyamanan yang didirikan militer Jepang di berbagai tempat di Cina yang diduduki. Ketika perang meluas ke wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, banyak wanita Korea juga dikirim ke sana. Tampaknya pelacur pertama direkrut dari Korea untuk pergi ke *comfort station* di luar negeri. Kemudian anak-anak perempuan dari keluarga miskin direkrut dengan berbagai cara. Diketahui bahwa penipuan atas nama pekerjaan yang baik mulai dilakukan sejak saat itu. Ada kesaksian bahwa anak perempuan direkrut atas kehendak mereka sendiri dengan membujuk dan mengintimidasi. Dari Korea, anak perempuan di bawah 21 tahun dibawa ke *comfort*

³⁸ Pyong Gap Min. 2003. Korean “Comfort Women”: The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class, diakses dari <https://doi.org/10.1177/0891243203257584> pada 05 Februari 2020



station, yang dilarang di Jepang. Di antara mereka bahkan ada anak perempuan yang berusia 16 atau 17 tahun³⁹.

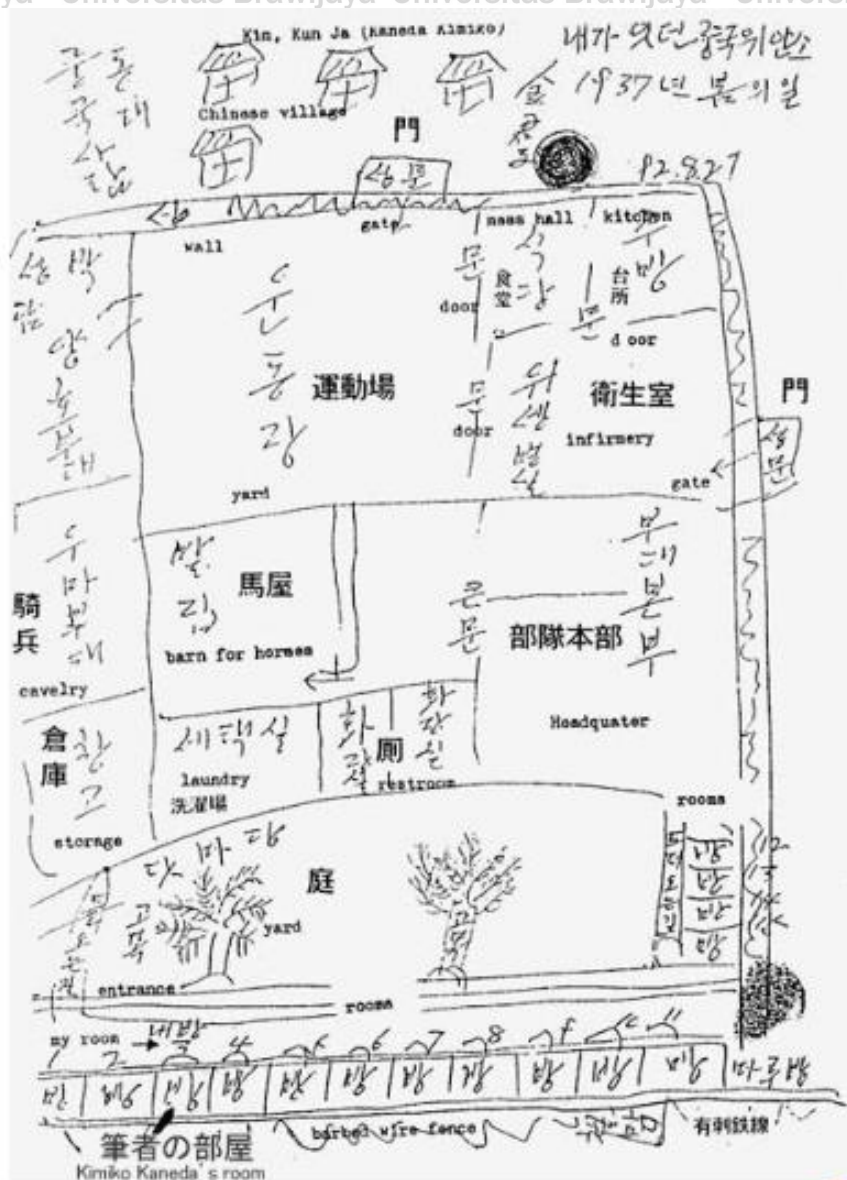
Salah satu contohnya adalah Kimiko Kaneda, seorang anak berdarah Jepang dan Korea. Pada tahun 1938, ketika dia berusia enam belas tahun dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, temannya merekomendasikan agar dia bekerja di tempat yang berbeda dan lebih baik. Dia dikirim ke *comfort station* di Zaoqing, Cina bersama gadis-gadis lain yang ditipu dengan cara yang sama. Karena perlawanannya,



³⁹ Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/korea.html> pada 05 Februari 2020



dia ditusuk dengan bayonet di dada dan pergelangan tangannya patah oleh seorang



tentara Jepang⁴⁰

Gambar 4.1 Peta Lokasi Comfort Station di Zaoqing yang digambarkan oleh Kimiko Kaneda
Sumber: Asian Women's Fund

⁴⁰ Ibid



Comfort station secara teratur dikelola oleh pemilik sipil, tetapi militer selalu secara dekat dan langsung mengendalikan berbagai aspek kegiatan pada *comfort station*. Hal ini dapat diketahui dari peraturan penggunaan *comfort station* yang diracik dengan cermat oleh unit tentara setempat. Beberapa contoh peraturan yang dibuat tersebut adalah *pertama*, bangunan untuk *comfort station* disediakan atau dibangun oleh militer. *Kedua*, kontrol keamanan diambil oleh militer. *Ketiga*, waktu kerja, liburan dan harga, penugasan klien ke setiap unit diputuskan oleh militer. *Keempat*, pemeriksaan penyakit seksual dilakukan oleh dokter militer. *Kelima*, militer menunjuk komite pelaksana dan dalam banyak kasus mengeluarkan tiket untuk tentara atau pengunjung *comfort station*⁴¹.

Pada mulanya, *comfort station* pertama kali didirikan atas permintaan otoritas militer Jepang, sebagai bagian dari upaya perang di Cina. Menurut dokumen militer, agen swasta pertama kali membuka rumah pelacuran untuk petugas dan pria yang ditempatkan di Manchuria, sekitar waktu Insiden Manchuria pada tahun 1931. Ketika perang menyebar ke Shanghai setelah Insiden Shanghai Pertama pada tahun 1932, *comfort station* pertama didirikan untuk brigade angkatan laut Jepang yang ditempatkan di sana. Jumlah *comfort station* meningkat pesat setelah perang Tiongkok-Jepang pecah pada tahun 1937. Yasuji Okamura selaku Wakil Kepala Staf

⁴¹ Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-09.html> pada 05 Februari 2020

Pasukan Ekspedisi Shanghai yang pertama kali mempromosikan pendirian *comfort station* untuk tentara Jepang⁴².

Rupanya ada sejumlah alasan untuk membangun *comfort station* tersebut.

Personil militer Jepang telah memperkosa wanita sipil Tiongkok di berbagai daerah yang diduduki pada banyak kesempatan, dan militer berharap dapat mencegah memburuknya perasaan anti-Jepang dari pihak orang-orang Cina; ada kebutuhan untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin di antara petugas dan pria, karena jika tidak efektivitas militer akan berkurang; dan juga dikhawatirkan kontak dengan perempuan sipil Tiongkok dapat mengakibatkan bocornya rahasia militer⁴³.



Gambar General Yasuji Okamura
Sumber: Asian Women's Fund

Wanita di *comfort station* tersebut dipaksa untuk memberikan layanan seksual kepada banyak petugas dan pria, martabat manusia mereka diinjak-injak. Menurut

⁴² Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-01.html> pada 05 Februari 2020

⁴³ Ibid

berbagai peraturan, *comfort station* dibuka untuk waktu yang lama sejak pukul 9:00 atau 10:00.sampai larut malam. Ada peraturan seperti yang dimiliki unit Morikawa yang ditempatkan di Huarongzen, yang mengatur waktu prajurit dari pukul 10: 00-18:00, waktu perwira yang tidak dikomisi dari pukul 19: 00-21:00⁴⁴. Di *comfort station* biasa, tentara membayar sejumlah uang secara langsung atau tidak langsung.

Jumlah uang biasanya dibagi menjadi dua bagian antara pemilik dan wanita penghibur. Tetapi tidak jelas apakah jumlah uang yang diserahkan kepada wanita selalu pasti. Para wanita penghibur diberikan waktu libur sekali dalam sebulan.

Namun demikian, terdapat *comfort station* yang bekerja tanpa liburan. Keluar dari *comfort station* pun hanya dimungkinkan dengan izin militer.

Tabel 4.1 Jumlah Comfort Station yang Tersebar di Seluruh Asia

Negara	Jumlah Comfort Station
North China	100
Central China	140
South China	40
South Asia	100
South Sea	10
Sakhalin	10
Total	400

Sumber: Asian Women’s Fund

Fenomena perbudakan seks oleh militer Jepang tersebut kemudian dikenal dengan istilah *comfort system*. Dari ‘*comfort system*’ yang diberlakukan oleh Pemerintah Jepang pada masa kolonialisme tersebut kemudian muncul istilah *comfort women*. Yang disebut "wanita penghibur masa perang" atau *comfort women* adalah

⁴⁴ Asian Women’s Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-12.html> pada 05 Februari 2020



mereka yang dibawa ke bekas instalasi militer Jepang, seperti stasiun penghibur, untuk jangka waktu tertentu selama masa perang di masa lalu dan dipaksa untuk memberikan layanan seksual kepada para perwira dan prajurit⁴⁵. Istilah tersebut diterjemahkan secara harfiah dari bahasa Jepang yaitu *Jugun Ianfu* yang diartikan sebagai para wanita yang memberikan kenyamanan atau hiburan bagi tentara Jepang di lokalisasi yang dibangun oleh Pemerintah Jepang atau yang disebut sebagai *comfort stations*. Lokalisasi tersebut berada di dalam barak-barak militer yang dibangun di sekitaran markas tentara Jepang selama perang Asia-Pasifik berlangsung.

Meskipun berasal dari berbagai Negara seperti Korea, Cina, Taiwan, Jepang, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Timor Leste dan Indonesia, untuk dipaksa menjadi perbudakan seksual oleh Angkatan Bersenjata Pasukan Jepang antara 1932 dan 1945⁴⁶, dapat diperkirakan hampir 80% dari *comfort women* berasal dari Korea.

Hal ini karena pada zaman kolonialisme Jepang, wanita-wanita asal Korea Selatan lah yang paling diminati oleh tentara Jepang karena sebagian besar *Jugun Ianfu* asal Korea Selatan mengerti dan bisa berbahasa Jepang dengan baik. Hal inilah yang kemudian memicu semakin banyaknya jumlah wanita asal Korea Selatan yang diculik untuk dijadikan *Jugun Ianfu*⁴⁷.

⁴⁵ Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-00.html> pada 05 Februari 2020

⁴⁶ Henry Scott Stokes. 2014. *Fabricating Historical Facts by Published by the Society for the Dissemination of Historical Fact*

⁴⁷ Hendrajit. 2016. "Analisis dalam *Jugun Ianfu (Comfort Woman)*". The Global Review bisa diakses di www.theglobalreview.com/content-detail pada 19 September 2019

Tidak ditemukan data yang akurat terkait jumlah *ianfu* korban budak seks militer Jepang pada saat itu. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen yang menjelaskan jumlah tersebut. Namun terdapat beberapa ilmuwan yang memperkirakan jumlah *ianfu*.

Tabel 4.2 Jumlah Comfort Women Menurut Beberapa Peneliti

Peneliti	Tahun Publikasi	Jumlah Personel Militer	Parameter	<i>Replacement</i>	Jumlah <i>Comfort Women</i>
Ikuhiko Hata	1993	3 Juta	1 untuk 50 tentara	1.5	90.000
Yoshiaki Yoshimi	1995	3 Juta	1 untuk 50 tentara	1.5	45.000
			1 untuk 30 tentara	2	200.000
Su Zhiliang	1999	3 Juta	1 untuk 30 tentara	3.5	360.000
				4	410.000
Ikuhiko Hata	1999	2.5 Juta	1 untuk 150 tentara	1.5	20.000

Sumber: *Asian's Women Fund*

Jika kita menggunakan rasio 1 wanita penghibur per 100 personel militer, dan jika kita memperkirakan bahwa rata-rata seorang tentara pergi ke *comfort women* sebulan sekali, kita dapat berpendapat bahwa setiap wanita penghibur dikunjungi oleh lima tentara dalam satu hari, dengan rata-rata 10 hari libur per bulan. Karena wanita kadang-kadang tidak dapat bekerja karena sakit, sehingga data tersebut mendekati angka sebenarnya. Ketika mendiskusikan asal-usul etnisnya, Kim Il Myon menegaskan bahwa 80 hingga 90% dari semua wanita penghibur adalah orang Korea, dengan total 170.000 hingga 200.000 wanita penghibur Korea. Namun, tidak ada



statistik yang mendukung perkiraan ini. Pembacaan yang cermat atas semua dokumen yang tersedia menunjukkan bahwa banyak dari wanita itu memang dari Korea, tetapi mungkin bukan mayoritas. Bagaimanapun, banyak dari wanita itu adalah orang Jepang.

Dari beberapa perkiraan tersebut, data yang paling sering digunakan adalah data Yoshimi Yoshiaki yaitu sebanyak 200.000 orang *ianfu*. Jumlah ini juga digunakan oleh G. J. McDougal yang merupakan Pelapor Khusus Sub-Komisi PBB untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas dalam laporannya yang berjudul “Bentuk Perbudakan Kontemporer: Pemerksaan Sistematis, Perbudakan Seksual dan Praktik Perbudakan Selama Konflik Bersenjata” tanggal 22 Juni 1998.

Dari Jumlah tersebut, Kim Il Myon (Penulis buku “*Tenno no Guntai to Chosenjin Ianfu*” atau “*The Emperor’s Army and The Korean Comfort Women*”) memperkirakan sebanyak 80 persen dari keseluruhan jumlah *ianfu* atau sekitar 160.000 *ianfu* berasal dari Korea⁴⁸.

Tabel 4.3 Proporsi etnis *comfort women* yang pergi ke Cina melalui provinsi Taiwan dari November 1938 hingga Desember 1939

	Japanese	Korean	Taiwanese
Taihoku Province	649	207	229
Shinchiku Province	65	86	11
Taichu Province	3	143	27
Takao Province	218	53	117
Tainan Province	3	72	0
Total	938 (49,8%)	561 (40,1%)	384 (20,4%)

⁴⁸ Asian Women’s Fund. (tanpa tahun). *Number of comfort Stations and Comfort Women*. Diakses dari <http://www.awf.or.jp/el/facts-07.html> pada 19 September 2019



Sumber: Asian Women's Fund

Perang Pasifik berakhir pada 15 Agustus 1945, tetapi para wanita penghibur yang selamat selama masa perbudakan seksual tersebut tidak bisa pulang dengan mudah. Diketahui bahwa banyak wanita menyerah untuk kembali ke rumah mereka karena rasa malu dan tetap tinggal di negeri asing, tinggal di sana selama sisa hari-hari mereka. Diantaranya wanita-wanita Korea yang dibawa ke Cina yang tetap di sana setelah perang dan beberapa dari mereka kembali ke Korea Selatan pada tahun 1990-an. Dalam banyak kasus, mereka yang kembali ke rumah menderita luka-luka dan menjalani kehidupan dengan menyedihkan, tidak dapat melupakan kekejaman masa lalu. Banyak yang menderita cacat fisik dan penyakit kelamin, dan tidak dapat melahirkan anak. Yang lain tidak bisa menikah. Dan mereka yang akhirnya menikah seringkali harus menyembunyikan masa lalu mereka, tidak mampu memberi tahu orang lain tentang rasa sakit yang mereka rasakan di hati mereka. Ini akan menjadi salah satu beban terberat yang harus ditanggung⁴⁹.

⁴⁹ Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-12.html> pada 05 Februari 2020



Gambar 4.2 *Comfort Women* Korea Yang Selamat Dan Dilindungi Di Lameng Yunan, 3 September 1945
Sumber: The US National Archives

Saat ini, para korban wanita penghibur di jaman penjajahan Jepang ditempatkan di suatu kompleks bernama *House of Sharing* yang terletak di Gwangju, provinsi Gyeonggi (sekitar 50,6 km dari Seoul). Dikelilingi oleh lingkungan yang asri, tempat ini menjadi pusat penyimpanan dokumentasi sekaligus rumah bagi para wanita Korea Selatan yang menjadi korban sebagai wanita penghibur di masa penjajahan Jepang. Pada awalnya *House of Sharing* didirikan di Seoul di bulan Juni 1992 sebagai panti werdha bagi para korban wanita dengan dana yang dikumpulkan oleh organisasi Buddha dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Kemudian pada tahun 1998 *House of Sharing* dipindahkan ke Gwangju untuk menempati bangunan yang baru, lebih luas dan modern. Tak hanya itu, Museum Perbudakan Seksual oleh



Uni Militer Jepang (*Museum of Sexual Slavery by Japanese Military*) juga dibangun sebagai edukasi sejarah bagi masyarakat umum⁵⁰.

Mayoritas pengunjung *House of Sharing* adalah murid, mahasiswa serta wisatawan lokal. Jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi tempat ini pun cukup banyak dan umumnya datang secara berkelompok. Khusus pada waktu-waktu tertentu, pengunjung berkesempatan untuk dapat langsung mendengar kesaksian dari beberapa korban yang tinggal di dalam kompleks tersebut sebagai bentuk penghormatan. Para korban yang masih hidup di usia senja disebut dengan istilah *halmoni* yang berarti nenek dalam bahasa Korea⁵¹.

4.2 Korea Selatan dan Jepang dalam Memandang Isu *Comfort Women*

Selama bertahun-tahun, Korea Selatan dan Jepang memiliki pandangan yang berbeda terkait isu *comfort women*. Dilain sisi, Korea Selatan sejak menjadi Negara merdeka dari kolonialisme Jepang, terus memperjuangkan hak-hak warga negaranya yang ditengarai telah mengalami perbudakan seks oleh militer Jepang pada masa penjajahan. Namun, Jepang tetap dalam pendiriannya yang menolak adanya fakta tersebut pernah terjadi dan dilakukan oleh militer Jepang.

Pada tahun 1977 seorang penulis Jepang, Seiji Yoshida, menulis sebuah buku berjudul "Wanita Penghibur Korea dan Jepang. Kisah yang dituliskan dalam buku

⁵⁰ Noviyanti Nurmala. 2018. Menelusuri Sejarah Hitam Wanita Korea Selatan di House of Sharing. <https://kumparan.com/noviyanti-nurmala1519197736585/menelusuri-sejarah-hitam-wanita-korea-selatan-di-house-of-sharing>

⁵¹ Ibid

tersebut diketahui tidak memiliki dasar dan bukti yang cukup kuat yang kemudian dilaporkan oleh The Asahi Shimbun pada 2 September 1982. Buku yang ditulisnya tersebut diketahui terlalu membesar-besarkan dan terkesan membohongi publik tanpa adanya data akurat dan bukti-bukti. Buku Yoshida kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Korea pada bulan Agustus tahun 1989. Sejak saat itulah mood anti-Jepang di Korea semakin tinggi⁵².

Pada tanggal 14 Agustus 1989, Ms. Heo Yeong-seon, seorang reporter dari surat kabar Jeju Ilbo meragukan cerita Yoshida tersebut dan melakukan penelitian di Pulau Jeju-do. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa Yoshida menuliskan kisah dalam bukunya tersebut tanpa ada saksi untuk cerita yang dijelaskan dalam buku. Terlebih, penduduk pulau dengan tegas membantah cerita itu sebagai omong kosong dan sangat meragukan kredibilitas buku itu. Lebih lanjut, pada tahun 1992 seorang sejarawan Ikuhiko Hata, juga melakukan penelitian di Pulau Jeju-do dan The Sankei Shimbun melaporkan bahwa tidak ada bukti untuk memverifikasi cerita Yoshida.

Pada 11 Januari 1992, Asahi Shimbun menuliskan artikel tentang wanita penghibur di halaman depan. Artikel tersebut merujuk pada dokumen yang ditemukan oleh profesor Universitas Chuo yaitu Yoshiaki Yoshimi. Profesor Yoshimi menggunakannya sebagai bukti keterlibatan militer dalam kasus wanita penghibur.

Dokumen tersebut sebenarnya memperingatkan malpraktek oleh operator bisnis dan menyerukan polisi dan militer untuk benar-benar menindak mereka. Karena hal tersebut telah menjadi sorotan publik dan dunia internasional, Perdana Menteri saat

⁵² Henry Scott Stokes, 2014. *Fabricating Historical Facts by Published by the Society for the Dissemination of Historical Fact*

itu, Kiichi Miyazawa, mengumumkan permintaan maafnya 2 hari kemudian. Bahkan PM meminta maaf sebanyak 8 kali ketika dia mengunjungi Korea pada 17 Januari 1992.

Dari sinilah pemerintah Korea mulai meningkatkan permintaannya dan mendesak untuk permintaan maaf lebih lanjut dari pemerintah Jepang. Dan akhirnya, pernyataan Kono yang terkenal itu dirilis pada 4 Agustus 1993. Pernyataan Kono (*Kono Statement*) tersebut mengacu pada pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet saat itu (Yohei Kono) dimana mengakui bahwa memang pernah terjadi penculikan paksa gadis-gadis Korea dan menyatakan permintaan maafnya. Hal ini berasal dari studi pemerintah yang menemukan bahwa Angkatan Darat Kekaisaran Jepang telah memaksa perempuan, yang dikenal sebagai wanita penghibur, untuk bekerja di rumah bordil yang dikelola militer, selama Perang Dunia II. Pemerintah Jepang pada awalnya menyangkal bahwa para wanita telah dipaksa sampai titik ini⁵³.

Adapun dalam *Kono Statement* tersebut, pemerintah Jepang mengakui beberapa hal, diantaranya⁵⁴:

1. Militer Jepang saat itu, secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam pendirian dan pengelolaan *comfort station*.
2. Perekrutan wanita penghibur dilakukan terutama oleh perekrut pribadi yang bertindak sebagai tanggapan atas permintaan militer.

⁵³ Sterngold, James (5 August 1993). "Japan Admits Army Forced Women Into War Brothels". *The New York Times*.

⁵⁴ Ministry of Foreign Affairs of Japan. Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of "comfort women", diakses dari <https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html>, 06 Februari 2020

3. Dalam banyak kasus mereka direkrut atas kehendak mereka sendiri, melalui pembujuk, pemaksaan, dll.

4. Kadang-kadang, personel administrasi / militer secara langsung mengambil bagian dalam proses rekrutmen.

5. Mereka hidup dalam kesengsaraan di *comfort women* di bawah atmosfer yang memaksa.

Hal serupa juga pernah terjadi sebelumnya, pada Januari 1990, seorang aktivis Korea Selatan yang bernama Yun Chung-ok mempublikasikan sebuah artikel tentang *comfort system* di *Hankyoreh Newspaper*. Artikel tersebut kemudian menjadi terkenal karena masyarakat memberikan perhatian yang besar pada sejarah hubungan Jepang-Korea. Lebih lanjut publik menuntut permintaan maaf serta mendesak Jepang untuk melakukan investigasi terkait hal ini. Reaksi mengejutkan diberikan oleh Jepang yang menyangkal keterlibatan militernya dalam pembentukan *comfort system* serta menolak adanya investigasi dalam masalah ini⁵⁵.

Penolakan Jepang tersebut menimbulkan reaksi dari sisi Korea Selatan dengan diajukannya 6 tuntutan terhadap pemerintah Jepang. Tuntutan tersebut berasal dari 37 organisasi wanita di Korea Selatan yang bergabung dengan sebuah kelompok relawan. Isi tuntutan tersebut adalah sebagai berikut⁵⁶:

1. Mengakui pemaksaan yang dilakukan kepada para *ianfu*

⁵⁵ Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *How Did The Comfort Women Issue Come to Light?* Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e2/survey.html> pada 06 Februari 2020

⁵⁶ Ibid

2. Mengeluarkan permintaan maaf
3. Melakukan investigasi untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dan mengungkapkannya
4. Membangun monumen untuk mengenang para korban
5. Membayar kompensasi kepada para korban atau keturunannya
6. Membentuk program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran sejarah dibalik isu ini.

Pada tahun 2006, Resolusi House 759 menyatakan bahwa pemerintah Jepang selama penjajahan Asia dan Kepulauan Pasifik dari tahun 1930-an sampai berakhirnya perang Dunia II telah mengorganisir penaklukan dan penculikan, untuk satu-satunya tujuan perbudakan seksual para wanita muda, yang kemudian dikenal oleh dunia internasional sebagai 'wanita penghibur'. Pada 2007, Mike Honda yang didukung oleh organisasi pelobi Cina-Amerika, mengajukan Resolusi 121 DPR yang menuntut agar pemerintah Jepang meminta maaf karena telah memaksa wanita muda untuk menjadi budak seks selama Perang Dunia II⁵⁷.

Sebenarnya, jika mundur kebelakang antara tahun 1970-1989, telah banyak media-media Korea Selatan yang menyebut atau membahas masalah *comfort women* ini. Namun pada saat itu, publik Korea Selatan masih menganggap hal tersebut tidak penting.

Tabel Jumlah Artikel JoongAng Ilbo (Surat Kabar Korea Selatan) yang menyebutkan *comfort women*

⁵⁷ Henry Scott Stokes, 2014. *Fabricating Historical Facts by Published by the Society for the Dissemination of Historical Fact*

Tahun	Jumlah Artikel
1970-1974	2
1975-1979	3
1980-1984	15
1985-1989	3

Sumber: Kan Kimura, 2015

Sejak tahun 1980-an jumlah artikel yang diterbitkan oleh JoongAng Ilbo jumlahnya menurun. Hal ini karena telah banyak buku-buku dan jurnal yang membahas tentang *comfort women* atau ianfu ini di Korea Selatan. Sebelumnya, sangat sulit ditemukan literatur terkait hal tersebut di Korea Selatan. Hal ini karena orang Korea Selatan lebih memilih untuk tidak membuka luka akibat perbudakan seks dan enggan untuk mengingat hal tersebut kembali. Semakin banyak buku-buku dan jurnal yang terbit pada awal tahun 1980-an, membuat isu *comfort women* mulai menjadi perhatian publik Korea Selatan. Sementara itu, sudah banyak buku-buku dan catatan tentang *ianfu* yang dituliskan dan diterbitkan di Jepang pada tahun 1950-an hingga 1970-an. Dengan demikian, secara data penulis Korea Selatan yang menulis tentang topik ini sangat bergantung pada buku-buku dan catatan yang berasal dari Jepang⁵⁸.

⁵⁸ Kan Kimura, 2015. *Discourses About Comfort Women in Japang, South Korea, and International Society. International Relations and Diplomacy*

Dalam memperjuangkan hak-haknya, para korban perbudakan seks masa penjajahan jepang di Korea Selatan membutuhkan waktu setidaknya empat dekade lamanya. Waktu yang sangat lama ini disebabkan oleh empat faktor penting, yaitu⁵⁹:

1. Wanita memiliki kekuatan dan pengaruh yang rendah dalam struktur social.

Dengan demikian, pemerkosaan yang dialami pada masa itu bukanlah isu yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian masyarakat atau pemerintah.

2. Lingkungan politik Korea Selatan tidak mendukung naiknya isu tersebut. Hal ini karena isu tersebut tenggelam dalam tujuan social pemerintah yang lebih besar seperti pembangunan bangsa, keamanan atau industrialisasi.
3. Isu *comfort women* telah lama diasumsikan sebagai masalah individual sehingga masalah ini tidak menjadi tanggung jawab publik.
4. Otoriternya system pemerintahan Korea Selatan membuat gerakan dan organisasi yang mendukung masalah ini sulit untuk bergerak dan beraktivitas.

Perjuangan mereka ini menjadi sangat penting dan harus dilakukan mengingat kebebasan mereka saat itu telah direnggut oleh militer Jepang. Yoshimi Yoshiaki mengutarakan bahwa setidaknya terdapat empat kebebasan yang telah dirampas dari para budak seks pada masa itu, yaitu kebebasan bertempat tinggal, kebebasan bergerak, kebebasan untuk menolak berhubungan seksual dan terakhir kebebasan untuk keluar. Hal ini karena para wanita tersebut dipaksa tinggal di sebuah ruangan

⁵⁹ Ibid



dalam area *comfort station* dan mereka dipaksa untuk melayani hasrat seksual para tentara Jepang tanpa bebas diijinkan keluar dari sana. Karena isu ini semakin berkembang dan kekuatan publik semakin besar dalam menyuarakan hal ini, maka pemerintah Korea Selatan akhirnya turun tangan mengatasi masalah ini.

Fakta menyebutkan bahwa Presiden Roh Tae-woo merupakan presiden pertama yang mengangkat isu ini di Korea Selatan. Presiden Roh Tae-woo membawa isu perbudakan seksual dan juga para korbannya yang berada di Korea Selatan ini dalam pertemuan bilateral dengan PM Jepang Miyazawa Kiichi pada bulan Januari 1992⁶⁰. Perjuangan untuk mendesak Jepang menyelidiki fakta mengenai *jugun ianfu* atau *comfort women* serta menuntut permintaan maaf dari pemerintah Jepang terus dilakukan oleh presiden yang menjabat pada tahun-tahun selanjutnya. Hingga pada akhirnya pemeritahan di bawah Presiden Lee Myung-bak menjadi masa kritis hubungan Korea Selatan-Jepang. Meskipun pada awalnya Presiden Lee Myung-bak bersikap lunak terhadap masalah ini namun sejak Agustus 2011 dimana Pengadilan Konstitusional Korea Selatan mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa tidak konstitusional bagi pemerintah Korea Selatan jika tidak mencari kompensasi bagi mantan ‘wanita penghibur’, merubah segalanya.

Ditambah lagi didirikannya patung symbol *ianfu* atau para wanita budak seks pada masa kolonial Jepang atau disebut dengan *Pyeonghwa-bi* (monument perdamaian) membuat ketegangan diantara Korea Selatan-Jepang semakin meningkat. Patung ini didirikan sejak 14 Desember 2011 dan ditempatkan di depan

⁶⁰ Tsutomu Nishioka. 2015. *The Comfort Women Issue in Sharper Focus*. Tokyo: Japan Policy Institute, Hal 12



Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Patung perunggu setinggi 1,5 meter tersebut menggambarkan seorang perempuan muda duduk di bangku tanpa alas kaki. Patung ini menjadi symbol ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan penghibur Korea dan lambang perjuangan mereka untuk memperoleh permintaan maaf resmi serta kompensasi dari Jepang⁶¹. Hal ini menyebabkan kemurkaan pemerintah Jepang dan membuat pemerintah Jepang menarik Kedubes mereka untuk sementara waktu dari Korea Selatan.

Sikap bertentangan pemerintah Jepang yang terkesan acuh dan mengabaikan isu ini bertentangan dengan sebuah kelompok wanita Jepang yang justru merasa bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukan negaranya. Kelompok tersebut bernama *Violence Against Women in War Network, Japan* (VAWW-NET Japan). Kelompok ini mencetuskan sebuah pengadilan HAM Internasional (*The Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery*) yang bersifat simbolis di Tokyo pada tanggal 8-10 Desember 2000 silam.

VAWW-NET Japan mengajukan proposal *Tokyo Women's Tribunal* yang memiliki dua tujuan yaitu⁶²:

1. Menegaskan bahwa *comfort system* merupakan kejahatan perang terhadap perempuan dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta menekan pemerintah Jepang untuk mengambil tanggungjawab hukum.

⁶¹ BBC News. 2017. Jepang tarik duta besarnya terkait patung 'budak seks' di Korea Selatan. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527303>, 10 Februari 2020

⁶² Yayori Matsuri, *Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery: Memory, Identity and Society* dalam Peter Li, 2009. *Japanese War Crimes The Search for Justice*. New Brunswick: Transaction Publishers, Hal 259



2. Mengakhiri siklus impunitas kekerasan terhadap perempuan sebagai budak seks di masa perang dan mencegahnya terjadi kembali di berbagai belahan dunia.

4.3 Agreement on Comfort Women

Kondisi kelam perbudakan seks pada masa kolonial Jepang masih menyisakan luka di hati para korban. Bertahun-tahun telah berlalu sejak masa penjajahan Jepang dan segala bentuk kekejamannya, dan setelah sekian lama negara-negara bekas jajahan Jepang banyak yang menuntut tindakan asusila yang dilakukan oleh militer Jepang zaman dahulu. Salah satu negara yang gencar mendesak Pemerintah Jepang untuk mengatasi isu ini adalah Korea Selatan. Berawal dari perjuangan sekelompok individu yang menyebut diri mereka sebagai aktivis pembela hak-hak sipil Korea Selatan, isu ini semakin santer menyeruak di permukaan. Bahkan Amerika Serikat turut menekan kedua belah pihak (Korea Selatan dan Jepang) untuk menyelesaikan permasalahan pelik ini. Pada saat isu *comfort women* ini berkembang, terutama di Korea Selatan, Pemerintah Jepang beralih bahwa hal itu merupakan bentuk pelacuran dari para wanita yang bersedia memberikan dirinya dengan sukarela. Lebih lanjut, Pemerintah Jepang juga mengatakan bahwa wanita-wanita tersebut sengaja mempekerjakan diri sebagai pelacur dengan motif mencari keuntungan dan uang⁶³.

Berdasarkan pengkajian mendalam, *comfort women* tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk pelacuran sebab terdapat tiga indikator yang tidak ditemukan dalam

⁶³ Jumaningsih, Maia. 1999. Dampak Kekerasan Seksual pada Jugun Ianfu. Yogyakarta: Ford Foundation PPK-UGM, Hlm. 6



fenomena tersebut yaitu pembayaran, promiskuitas (hubungan seksual sesat yang dilakukan dengan siapa saja) dan ketidakterlibatan emosional⁶⁴. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *comfort women* benar-benar berbeda dengan pelacuran sebab mereka melayani kebutuhan seksual tentara Jepang bukan atas kemauan sendiri melainkan karena paksaan hingga penculikan dan penipuan. Oleh karena itu dunia mengecam beban masa lalu Jepang tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM berat yang tergolong dalam kekerasan seksual.

Dengan semakin banyaknya aktivitas dan massa yang menyuarkan hak-hak *comfort women*, hubungan Korea Selatan dan Jepang kembali memanas pada tahun 2011. Hal ini ditandai dengan didirikannya patung wanita yang merepresentasikan simbol *comfort women* di depan Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan. Pada tanggal 14 Desember 2011, para korban dan KCWS (*The Korean Council for The Women Drafted for Sexual slavery*) yang merupakan suatu bentuk *women redress movement* (dalam bahasa korea disebut sebagai Jeongdaehyeob) mendirikan patung Pyeonghwabi atau *Statue of Peace* sebagai personifikasi penderitaan para korban *comfort women system* dan ditempatkan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Tak hanya sebagai peringatan simbolis, patung ini menjadi pernyataan konfrontatif para korban bahwa pemerintah Jepang tak kunjung memenuhi tanggung jawabnya⁶⁵.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Korea Verband. 2017. *Die Freidensstatue*, diakses dari <http://www.koreaverband.de/trostfrauen/friedensstatue>, pada 19 September 2019

Patung tersebut berupa seorang gadis duduk di kursi dan bertelanjang kaki dan memandang Kedubes Jepang sebagai perlambang seluruh *Jugun Ianfu* dari Korea⁶⁶.

Memori historis atas kekejaman zaman kolonial Jepang seperti isu *Text book* yang memuat materi historis yang diduga telah diubah esensinya oleh Jepang, isu masalah teritorial Dokdo-Takhesima serta yang paling pelik isu *comfort women*, telah menjadi hambatan besar terhadap hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Sejarah mencatat sejak Korea Selatan merdeka atas penjajahan Jepang pada tahun 1945, terdapat beberapa kali upaya kedua negara melakukan hubungan diplomasi. Hal ini tidak pernah benar-benar terwujud karena masih adanya isu historis diantara keduanya yang belum terselesaikan. Percobaan pertama untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara keduanya terjadi pada tahun 1965 dengan adanya perjanjian tentang hubungan dasar (*basic relations*) antara Jepang dan Korea Selatan. Pengangkatan isu *comfort women* pertama kali dilakukan pada tahun 1991 dimana pada saat itu mantan wanita penghibur zaman kolonial Jepang pertama kali berbicara di hadapan publik dan menentang Pemerintah Jepang. Semenjak mencuatnya isu tersebut, hubungan diplomatik antara kedua negara terekam sebagai berikut.

Selama bertahun-tahun hubungan Korea Selatan-Jepang tidak mengalami perkembangan yang signifikan hingga akhirnya isu *comfort women* kembali mencuat ke permukaan dengan adanya demonstrasi besar-besaran pada tahun 2011. Setelah selama kurang lebih 25 tahun menjadi perdebatan dan menjadi salah satu pembahasan

⁶⁶ Amardhanu, Denny. 2015. Pertemuan Korsel-China-Jepang akan Bahas Jugun Ianfu. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030145533-113-88456/peremuan-korsel-china-jepang-akan-bahas-jugun-ianfu>, pada 19 September 2019

penting dalam diskusi kedua negara, akhirnya Korea Selatan dan Jepang sepakat untuk menyelesaikan isu jugun ianfu di tahun 2015. Proses negosiasi yang panjang telah dialalui oleh kedua Negara hingga akhirnya mencapai kesepakatan tersebut.

Pemerintah Korea Selatan dan Jepang menggelar pertemuan untuk pertama kalinya dimana pertemuan kedua negara tersebut dilakukan bersama dengan pihak Amerika Serikat di sela-sela Konferensi Keamanan Nuklir di Den Haag Belanda tahun 2014⁶⁷. Hal tersebut merupakan pertemuan pertama kedua pemimpin sejak mulai menjabat dimana Shinzo Abe mulai memimpin Jepang pada Desember 2012 dan Park Geun-hye menjabat sebagai Presiden Korea Selatan sejak Februari 2013. Pada pertemuan tersebut kedua negara menyetujui untuk menggelar diskusi tingkat direktur jenderal sebagai upaya dalam penyelesaian isu jugun ianfu

Selain diskusi pada level pemimpin negara, kedua belah pihak juga mengadakan pembicaran tertutup pada level direktur jenderal, di mana Korea Selatan mengutus kepala staf kepresidenannya yang juga merupakan mantan Direktur Badan Intelijen Negara Lee Byung-kee sebagai negosiator dan Jepang mengutus Sekretaris Jenderal Keamanan Nasionalnya sebagai negosiator. Diskusi tertutup tersebut setidaknya mencapai 12 kali pertemuan yang mulai dilakukan sejak 16 April 2014 sampai satu hari sebelum pengumuman perjanjian tersebut. Diskusi level jendral ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara

⁶⁷ BBCNewsIndonesia. 2014. Pertemuan Pertama Pemimpin Jepang dan Korea, Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140321_jepang_korsel_bertemu, pada 19 September 2019



pada KTT Keamanan Nuklir di Den Haag bersama dengan pihak Amerika Serikat pada maret 2014.

Tabel 1.2 Jadwal Diskusi tertutup tingkat Direktur Jenderal Korea Selatan-Jepang terkait dengan isu *Jugun Ianfu*

Sesi	Tanggal	Tempat
1	16 April 2014	Seoul
2	15 Mei 2014	Tokyo
3	23 Juli 2014	Seoul
4	19 September 2014	Tokyo
5	27 November 2014	Seoul
6	19 Januari 2015	Tokyo
7	16 Maret 2015	Seoul
8	11 Juni 2015	Tokyo
9	18 September 2015	Tokyo
10	11 November 2015	Seoul
11	15 Desember 2015	Tokyo
12	27 Desember 2015	Seoul

Sumber : *Report on the review of the Korea-Japan Agreement of December 28, 2015 on the Issue of "Comfort Woman" Victims*

Dari dua belas sesi pertemuan tertutup tersebut, Pemerintah Jepang dan Korea Selatan akhirnya mencapai kesepakatan bersejarah untuk menyelesaikan masalah jugun-ianfu atau "wanita penghibur" yang dipaksa bekerja di rumah bordil Jepang selama Perang Dunia II. Dimana Kesepakatan ini diumumkan Senin 28 Desember 2015⁶⁸. Dalam skema yang disepakati ini, Pemerintah Jepang menawarkan

⁶⁸ Tempo.co. 2015. Kasus Jugun Ianfu, Jepang Minta Maaf pada Korea Selatan, diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/731342/kasus-jugun-ianfu-jepang-minta-maaf-pada-korea-selatan/full&view=ok>, pada 19 September 2019

permintaan maaf dan siap membayar 1 miliar yen atau senilai US\$ 8,3 juta dari anggaran nasionalnya untuk korban perbudakan seks tentara Jepang di Korea Selatan⁶⁹. Dalam perjanjian tersebut kedua Negara sukses menyusun perjanjian yang terdiri dari 3 paragraf penting terkait penyelesaian masalah perbudakan seksual yang kemudian diharapkan dapat memperbaiki hubungan bilateral diantara keduanya⁷⁰. Isi dari perjanjian tersebut adalah⁷¹:

1. Pemerintah Jepang menawarkan permintaan maaf dari Perdana Menteri Shinzo Abe atas penderitaan yang dialami oleh para *jugun ianf* di Korea Selatan.
2. Pemerintah Jepang bersedia membayar 1 miliar yen atau senilai US\$ 8,3 juta dari anggaran nasionalnya untuk korban perbudakan seks tentara Jepang di Korea Selatan sebagai kompensasi.

Dari keduanya, Pemerintah Jepang telah berkomitme untuk mewujudkan hal tersebut dan keduanya telah dilakukan oleh Pemerintah Jepang. Meskipun pada prakteknya, kelompok LSM di Korea Seltan tidak akan sepenuhnya puas karena permintaan maaf yang diberikan oleh Pemerintah Jepang dianggap tidak tulus dan tidak melibatkan para mantan *comfort women* secara langsung. Meski demikian kesepakatan tersebut berjalan lebih jauh daripada yang diperkirakan. Tanggung jawab berat justru berada di tangan pemerintah Korea Selatan untuk memenuhi

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Stephen Haggart, "The Comfort Women Agreement", diakses dari <https://piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/comfortwomen-agreement#content>, pada 19 September 2019

⁷¹ Ibid

komitmennya dalam perjanjian ini dan mejadikan hal ini sebagai penyelesaian akhir dari masalah *comfort women* diantara kedua negara. Hal ini berarti kondisi domestik yang kompleks membuat pemerintah Korea Selatan harus dapat mengelola reaksi dari LSM dan kelompok oposisi politik.



BAB V**ANALISIS AGREEMENT ON COMFORT WOMEN MENGGUNAKAN
KONSEP PUZZLE REKONSILIASI**

Sejak tahun 1965, dimana Korea Selatan-Jepang sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan diantara keduanya melalui penandatanganan *The 1965 Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea*, kedua Negara tersebut telah berusaha membangun hubungan yang baik dalam seagala bidang. Hingga mendekati keduanya menjadi sekutu Amerika Serikat serta berkontribusi dalam berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik, khususnya pada bidang stabilitas dan perdamaian. Sejak tahun 1965, diketahui Korea Selatan-Jepang memiliki hubungan baik di bidang ekonomi serta pertukaran budaya.

Hal ini salah satunya ditandai dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan Jepang ke Korea Selatan dan sebaliknya menjadi jutaan wisatawan yang semula hanya ribuan (10.000 orang) di tahun 1965. Tidak hanya itu, pertukaran budaya diantara keduanya pun terus meningkat sejak tahun 1998 dimana sejak saat itu larangan masuknya budaya Jepang ke Korea Selatan dicabut. Begitu juga sebaliknya dengan budaya *Korean Wave* atau dikenal pula dengan *hallyu* yang menjadi semakin populer di Jepang dari tahun ke tahun⁷².

Meskipun demikian, hubungan di bidang politik tidak berjalan semulus di kedua bidang tersebut. Hal ini dikarenakan ego Korea Selatan maupun Jepang dalam

⁷² Cheol Hee Park. 2015. *Still Distant Neighbors: South Korea-Japan Relations Fifty Years After Diplomatic Normalization*. Council on Foreign Relations. Hal 2



menyikapi masalah historis dan territorial. Salah satu batu sangdungan terbesar bagi hubungan politik kedua Negara tersebut adalah isu *comfort women* atau disebut juga dengan *jugun ianfu*. Masalah ini disebabkan *Treaty on Basic Realtions* 1965 tidak menyelesaikan kontroversi historis ini. Tahun 2011 menjadi tahun kritis bagi hubungan Korea Selatan-Jepang karena *massive-*nya tuntutan publik korea menuntut sikap tegas Jepang dalam menyelesaikan masalah *comfort women* ini.

Dengan semakin banyaknya aktivitas dan massa yang menyuarakan hak-hak *comfort women*, hubungan Korea Selatan dan Jepang kembali memanas pada tahun 2011. Hal ini ditandai dengan didirikannya patung wanita yang merepresentasikan simbol *comfort women* di depan Kedutaan Besa Jepang di Korea Selatan. Pada tanggal 14 Desember 2011, para korban dan KCWS (*The Korean Council for The Women Drafted for Sexual slavery*) yang merupakan suatu bentuk *women redress movement* (dalam bahasa korea disebut sebagai Jeongdaehyeob) mendirikan patung Pyeonghwabi atau *Statue of Peace* sebagai personifikasi penderitaan para korban *comfort women system* dan ditempatkan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul.

Tak hanya sebagai peringatan simbolis, patung ini menjadi pernyataan konfrontatif para korban bahwa pemerintah Jepang tak kunjung memenuhi tanggung jawabnya⁷³.

Patung tersebut berupa seorang gadis duduk di kursi dan bertelanjang kaki dan memandang Kedubes Jepang sebagai perlambang seluruh *Jugun Ianfu* dari

⁷³ Korea Verband. 2017. *Die Freidensstatue*, diakses dari <http://www.koreaverband.de/trostfrauen/friedensstatue>, 6 April 2019



Korea⁷⁴. Patung tersebut berbentuk seorang remaja mengenakan pakaian tradisional Korea tersebut menjadi simbolis memperingati korban budak seks (*Jugun Ianfu*) selama Perang Dunia II oleh tentara Jepang⁷⁵. Patung tersebut dipasang dalam aksi demonstrasi untuk menandai 100 tahun penjajahan Jepang. Selain itu, para aktivis juga menyerukan permintaan maaf dan kompensasi dari Jepang⁷⁶.

Demonstrasi tersebut disebut sebagai *Wednesday Demonstration* yang dikoordinasi oleh pemerintah Korea Selatan yaitu “*Korean Council for the women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan*”⁷⁷. *Wednesday Demonstration* itu sendiri adalah protes mingguan di Korea yang bertujuan untuk memperoleh keadilan dari Pemerintah Jepang tentang system perbudakan seksual skala besar yang didirikan di bawah pemerintahan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Aksi protes mingguan ini diadakan di hadapan para wanita penghibur yang masih hidup pada setiap hari Rabu siang di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa ada 37 korban budak seks yang masih hidup di Korea Selatan⁷⁸.

⁷⁴ Amardhanu, Denny. 2015. Pertemuan Korsel-China-Jepang akan Bahas Jugun Ianfu. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030145533-113-88456/pertemuan-korsel-china-jepang-akan-bahas-jugun-ianfu>, 06 April 2019

⁷⁵ Nugroho, Iqbal. 2015. Melihat Lebih dekat Patung Jugun Ianfu di Korea Selatan. Diakses dari <https://www.merdeka.com/foto/dunia/643700/20151229231713-melihat-lebih-dekat-patung-jugun-ianfu-di-korea-selatan-001-isn.html>, 06 April 2019

⁷⁶ BBCNewsIndonesia. 2017. Jepang tarik duta besarnya terkait patung 'budak seks' di Korea Selatan, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527303>, 13 Februari 2020

⁷⁷ Hyeong guk Jo, 2014. 22nd anniversary of Wednesday demonstration. Korea Selatan : The Kyunghyang Shinmun, diakses 13 Februari 2020

⁷⁸ BBCNewsIndonesia. 2017. Jepang tarik duta besarnya terkait patung 'budak seks' di Korea Selatan, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527303>, 13 Februari 2020



Hingga pada akhirnya setelah berbagai dinamika yang terjadi, pada tanggal 28 Desember 2015 Jepang dan Korea Selatan menandatangani suatu kesepakatan yang dikenal dengan *Agreement on Comfort Women*. Melalui kesepakatan tersebut, kedua Negara sepakat berdamai dan menyelesaikan masalah historis terkait system perbudakan seks tersebut. Dimana kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pemerintah Presiden Park Geun-hye dan Perdana Menteri Abe Shinzo. Tahun 2015 tersebut menandai peringatan 50 tahun perjanjian 1965 *Treaty of Basic Relations*, kedua Negara menandatangani perjanjian bersejarah untuk menyelesaikan konflik terkait *women issue* “*finally and irreversibly*”⁷⁹. Adapun proses panjang rekonsiliasi diantara Korea Selatan-Jepang terkait masalah *comfort women* akan dijabarkan sebagai berikut:

5.1 *Institutional Approach: Peningkatan Kerjasama Korea Selatan-Jepang*

Sebenarnya, Aspek institusional dan struktural ini sudah dapat disimpulkan ada sejak ditandatanganinya *Agreement on Comfort Women* tersebut. Namun, adanya dua kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini memperkuat hubungan antara keduanya dan mempercepat proses rekonsiliasi. Tahap rekonsiliasi terkait perselisihan historis *comfort women* antara Korea Selatan dan Jepang pertama kali ditandai dengan penandatanganan *Agreement on Comfort Women* tahun 2015.

Menurut Valerie Rosoux (2017), tahap awal dari rekonsiliasi adalah berupa peningkatan keamanan, ketergantungan ekonomi maupun kerjasama di bidang politik. Berdasarkan data historis, tidak ada riwayat hubungan kerjasama dalam

⁷⁹ Tom Le. (tanpa tahun). *Negotiating in Good Faith: Overcoming Legitimacy Problems in the Japan-South Korea Reconciliation Process*. Hal 2

bidang militer, pertahanan dan keamanan yang terjalin diantara keduanya sejak Korea Selatan merdeka dari penjajahan Jepang. Konflik perebutan wilayah teritorial atas Dokdho/Takeshima menjadi lecutan awal bagi kedua negara untuk mengupayakan hubungan kerjasama di bidang keamanan dan militer. Terlebih adanya aktivitas nuklir Korea Utara yang mengancam Trilateral antara AS-Korea Selatan-Jepang yang merupakan sekutu di Asia Timur. Selain itu meningkatnya tensi politik dan keamanan di Semenanjung Korea pada masa pemerintahan presiden Lee Myung-bak mengakibatkan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara memasuki fase krisis pada tahun 2010.

Dengan dasar inilah muncul wacana kerjasama di bidang militer, pertahanan dan keamanan Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2011 berupa *Acquisition and Cross-Servicing Agreement* dan *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA). Pada pelaksanaannya, sejak diinisiasi oleh kedua negara pada tahun 2011, kesepakatan ini menemui hambatan yang besar. Faktor penghambat terbesar terealisasinya kesepakatan ini ialah hambatan dari domestik atau internal Korea Selatan berupa sentimen anti-Jepang yang masih kuat di masyarakat Korea Selatan. Hal ini terlihat melalui munculnya argumen bahwa Lee Myung-bak secara tidak layak telah bekerjasama dengan bekas penjajah yang pernah bertindak brutal terhadap Korea Selatan. Akibat berbagai sentimen negatif dari seluruh lapisan Korea Selatan, perjanjian kesepakatan tersebut akhirnya ditunda.

Penolakan terhadap perjanjian GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang ini disebabkan olehagalnya Lee Myung-bak dalam mengkomunikasikan dengan baik kebijakan yang akan diambil tersebut kepada publik. Publik dan pemerintah Korea

Selatan mendesak penyelesaian isu *comfort women* segera dilaksanakan. Penolakan ini terus berlanjut hingga masa pemerintahan presiden Park Geun-hye yang kemudian secara *massive* memetakan kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya realisasi kerjasama dibidang militer, pertahanan dan keamanan dengan Jepang.. Hal ini sejalan dengan *statement* yang ditegaskan oleh Park Geun-hye diawal pemerintahannya bahwa Jepang harus dapat memulai inisiatif untuk dapat menyelesaikan konflik sejarah untuk dapat membangun kembali hubungan bilateral yang berorientasi ke depan dengan Korea Selatan⁸⁰.

Tak lama berselang setelah penyelesaian isu pelik antara kedua negara melalui *Agreement on Comfort Women*, kesepakatan GSOMIA dapat terealisasi meskipun banyak mendapatkan hambatan dan kritik dari berbagai lapisan utamanya dari publik Korea Selatan. Pada tanggal 23 November 2016, Pemerintah Korea Selatan dan Jepang menandatangani GSOMIA yang telah ditangguhkan selama empat tahun karena masalah oposisi di Korea Selatan⁸¹. Kesimpulan dari perjanjian GSOMIA ini adalah memberikan dasar hukum untuk dengan cepat berbagi informasi antara Tokyo dan Seoul. Diharapkan bahwa kemampuan negara-negara itu untuk mencegat rudal akan ditingkatkan melalui langkah-langkah seperti berbagi data radar secara bersamaan dari kapal yang dilengkapi dengan Sistem Tempur Aegis, yang dapat mengambil rudal balistik Korea Utara.

⁸⁰ Glosserman, Brad., Scott A. Snyder. 2015. *The Japan-South Korea Identity Clash*. New York: Columbia University Press

⁸¹ The Mainichi. 2016. Japan, S. Korea sign intelligence-sharing pact over N. Korean threat, diakses dari <https://mainichi.jp/english/articles/20161124/p2a/00m/0na/008000c>, 13 Februari 2020



Tokyo dan Seoul juga akan dapat berbagi informasi selain yang berkaitan dengan pengembangan nuklir dan rudal. Kementerian Pertahanan Jepang berharap untuk memperoleh informasi tentang rencana operasi AS-Korea Selatan jika terjadi situasi darurat di Semenanjung Korea. Jika kebingungan militer mengusir sejumlah besar orang termasuk warga negara Jepang, Jepang perlu berkolaborasi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, tetapi sulit bagi Jepang untuk memahami langkah-langkah spesifik yang diambil oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan sebelum perumusan kebijakan tersebut. GSOMIA. Dengan kemajuan dalam berbagi informasi, diyakini pelatihan dan kerja sama antara Jepang, Amerika Serikat dan Korea Selatan yang lebih dekat dengan situasi pertempuran aktual akan menjadi mungkin⁸².

Bagi Jepang, GSOMIA adalah simbol untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Selatan setelah perjanjian antara kedua negara tentang penyelesaian masalah *comfort women*. pemerintah Jepang tampaknya berharap bahwa perluasan kerja sama antara Jepang dan Korea Selatan akan mendorong keterlibatan positif dari Amerika Serikat. Sementara itu, bagi Korea Selatan perjanjian GSOMIA ini menjadi sangat penting mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara bahkan lebih merupakan masalah mendesak bagi Korea Selatan daripada bagi Jepang. Pada 23 November 2016, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan menggarisbawahi pentingnya GSOMIA, mengeluarkan komentar bahwa sumber informasi Jepang seperti radar, kapal selam dan pesawat patroli dapat memantau apa yang terjadi di

⁸² Ibid

Laut Jepang dan akan sangat membantu dalam memperoleh informasi tentang SLBM Korea Utara⁸³.

Disisi lain, dalam bidang ekonomi setelah normalisasi hubungan diplomatik, Jepang memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Selatan dan perdagangan mulai berkembang. Ada juga peningkatan interaksi di bidang lain, seperti pendirian perusahaan patungan dan kerjasama teknis. Faktor yang telah memiliki dampak signifikan pada hubungan antara Jepang dan Korea Selatan selama bertahun-tahun adalah defisit perdagangan Korea Selatan dengan Jepang, yang meningkat seiring dengan ekspansi perdagangan. Defisit perdagangan ini adalah salah satu faktor di balik gagalnya pembicaraan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Jepang-Korea Selatan⁸⁴.

Meski demikian, selama masalah pengakuan sejarah menyebabkan hubungan Jepang-Korea Selatan memburuk, hal itu membuat kepentingan Jepang yang menurun terhadap Korea Selatan dan telah menghambat kemajuan menuju peningkatan hubungan. Kepentingan Jepang untuk Korea Selatan mulai berkurang pertama dari perspektif keamanan setelah runtuhnya struktur Perang Dingin, dan kemudian kedua dari perspektif ekonomi karena globalisasi ekonomi Korea Selatan.

Sebaliknya, Cina menjadi semakin penting bagi Korea Selatan dalam hal keamanan dan ekonomi. Sebagai hasilnya, Korea Selatan secara bertahap bergeser ke posisi

⁸³ Ibid

⁸⁴ Hidehiko Mukoyama. 2016. Can Japan and South Korea Build A New Economic Relationship? —Recent Changes in the Global Environment May Help to Repair Relations— . Pacific Business and Industries Vol. XVI, 2016 No. 59



kebijakan luar negeri yang lebih mengarah ke Cina. Bukti bahwa Korea Selatan juga bergerak lebih dekat ke Cina dalam hal kebijakan luar negeri ekonomi termasuk fakta bahwa ia telah memberikan prioritas lebih tinggi pada pembentukan FTA dengan China daripada pada dimulainya kembali pembicaraan EPA dengan Jepang⁸⁵.

Sebagai akibat dari pergeseran ke Cina ini, Korea Selatan tidak hanya sangat dipengaruhi oleh tren ekonomi di Cina, tetapi juga berisiko mengganggu kestabilan hubungannya dengan Amerika Serikat. Ada kemungkinan bahwa hubungan Jepang-Korea Selatan akan memasuki fase baru karena Korea Selatan perlu memperbaiki ketergantungannya yang berlebihan pada Cina, dan juga karena gerakan menuju pembentukan blok ekonomi baru. Meski demikian, Jepang tetap menjadi mitra penting bagi Korea Selatan. Perusahaan Jepang dan Korea Selatan terhubung oleh rantai pasokan, dan kemajuan menuju integrasi ekonomi Jepang dan Korea Selatan akan menghasilkan banyak manfaat. Kedua negara juga memiliki masalah umum, seperti penuaan demografis dan angka kelahiran yang menurun, dan dapat saling belajar dalam hal kebijakan dan kegiatan. Mengingat kepentingan bersama ini, Jepang dan Korea Selatan harus mengambil keuntungan dari perubahan lingkungan baru-baru ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih matang⁸⁶.

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ibid

5.2 Relationship Approach: Pemulihan Emosional dan Kognitif Korea Selatan-

Jepang

Tahap rekonsiliasi yang kedua menurut Valerie Rosoux (2017) ditandai dengan adanya proses pemulihan hubungan kedua negara dari aspek emosional dan kognitif. Ketegangan demi ketegangan dirasakan oleh Korea Selatan dan Jepang bertahun-tahun sebelum dicapainya kesepakatan *comfort women* pada tahun 2015.

Setelah kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, tensi diantara kedua Negara sempat menurun beberapa saat hingga akhirnya masalah kembali muncul atas pernyataan Jepang melalui Perdana Menteri Abe kepada orang-orang yang dekat dengannya bahwa perjanjian tersebut tidak akan diubah sedikitpun⁸⁷. Hal ini membuat Presiden Korea Selatan pada saat itu, Moon Jae-in mengatakan bahwa perjanjian tahun 2015 dengan Jepang mengenai “wanita penghibur” benar-benar cacat.

Panel Korea Selatan yang dibentuk untuk menyelidiki kesepakatan menyimpulkan bahwa pihaknya gagal memenuhi kebutuhan ribuan anak perempuan dan perempuan yang dipaksa untuk bekerja di rumah bordil militer Jepang, banyak dari mereka adalah Korea, yang secara halus disebut "wanita penghibur" oleh Jepang.

Menurut Presiden Moon Jae-in, kesepakatan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah *comfort women*. Lebih lanjut Moon menyebutkan bahwa kesepakatan

⁸⁷ Joyce Lee & Hyonhee Shin. 2017. South Korea says 'comfort women' deal flawed, but Japan warns against change, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-comfortwomen/south-korea-says-comfort-women-deal-flawed-but-japan-warns-against-change-idUSKBN1EM056>, 13 Februari 2020



tersebut hanyalah perjanjian politik yang mengecualikan korban dan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip umum dalam masyarakat internasional⁸⁸.

Pernyataan Presiden Moon Jae-in ini direspon oleh Jepang melalui Seorang juru bicara kementerian luar negeri Jepang. Ia mengatakan bahwa Jepang telah menyampaikan posisinya ke Korea Selatan melalui saluran diplomatik setelah pernyataan Moon, menegaskan kembali komentar Menteri Luar Negeri Taro Kono bahwa setiap upaya untuk mengubah kesepakatan akan "tidak dapat diterima" dan membuat hubungan diantara Korea Selatan-Jepang "tidak dapat dikelola"⁸⁹.

Meskipun tidak sampai menimbulkan ketegangan dan reaksi yang berlebihan seperti sebelum adanya kesepakatan tahun 2015, namun hubungan kedua Negara menjadi dingin. Kantor berita Kyodo Jepang mengutip sumber pemerintah Jepang yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa menjadi sulit bagi Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mengunjungi Korea Selatan pada waktunya untuk Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang pada bulan Februari Tahun 2018⁹⁰.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Roh Kyu-deok mengatakan bahwa terlepas dari sikap pemerintah Jepang, pemerintah Korea Selatan menganggap hasil penyelidikan dengan serius dan rendah hati. Moon berjanji untuk menormalkan hubungan dan bekerja menuju kerjasama berorientasi masa depan dengan Jepang seraya kembali menegosiasikan perjanjian tersebut di saat yang memungkinkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Roh Kyu-deok

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid



juga mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan akan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut sesegera mungkin yang dapat membantu para korban mendapatkan kembali kehormatan dan menyembuhkan luka di hati mereka⁹¹.

Berdasarkan masalah ini dapat dilihat bahwa dari sisi emosional, kedua Negara telah mencapai tahap rekonsiliasi karena tidak lagi saling mengandalkan ego masing-masing. Tensi politik diantara keduanya pun berangsur mereda dalam mengatasi segala permasalahan yang muncul terkait dengan *comfort women*. Hal ini tidak terlepas dari peran AS, dimana Departemen Luar Negeri AS menekankan pentingnya Amerika Serikat untuk menjalin hubungan yang kuat antara dua sekutu utamanya di Asia tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Michael Cavey, telah lama mendorong semua pihak untuk bekerja bersama dan mendekati masalah sensitif ini dengan cara yang akan mempromosikan penyembuhan, rekonsiliasi, dan saling percaya. Jepang dan Korea Selatan memiliki sejarah yang pahit, termasuk penjajahan Jepang, tetapi merupakan kunci bagi upaya internasional untuk mengendalikan program nuklir dan rudal yang dilakukan Korea Utara yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan AS.

Tidak berhenti disitu, masalah kembali muncul pada tahun 2019 yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan yang sempat menurun selama beberapa tahun terakhir di antara Korea Selatan dan Jepang. Pada tanggal 22 Agustus 2019 lalu, pemerintah Korea Selatan mengumumkan tentang niatnya untuk tidak memperpanjang kesepakatan GSOMIA yang telah ditandatangani oleh keduanya

⁹¹ Ibid

pada tahun 2016. Kondisi ini sebagai ujung dari eskalasi sengketa Jepang dan Korea Selatan setelah masing-masing pihak menghapus satu sama lain dari daftar mitra dagang pilihan (*white list*) pada bulan sebelumnya⁹².

Setelah diakhiri, perjanjian itu akan sulit untuk disusun kembali mengingat hambatan politik domestik di masa lalu, khususnya di Korea Selatan. Meskipun tindakan ini diarahkan secara langsung ke Jepang, tindakan ini melemahkan aliansi AS-Korea Selatan karena melemahkan kerja sama trilateral di antara ketiga negara⁹³.

Namun pada November 2019, kantor kepresidenan Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka akan berbalik arah pada keputusan sebelumnya untuk mengakhiri pakta berbagi intelijen kunci dengan Jepang hanya beberapa jam sebelum berakhirnya kesepakatan yang diharapkan⁹⁴.

Hal ini tidak terlepas dari tekanan terus menerus dari AS. Washington menuntut agar Seoul memperbarui pakta tersebut, yang secara luas dianggap sebagai simbol kerja sama militer antara Korea Selatan, Jepang, dan AS melawan Korea Utara. Para pengamat mengatakan pencabutan Seoul dari pakta itu bisa lebih meningkatkan sengketa diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang, yang menarik

⁹² Victor Cha. 2019. The Meaning of GSOMIA Termination: Escalation of the Japan-Korea Dispute, diakses dari <https://beyondparallel.csis.org/the-meaning-of-gsomia-termination-escalation-of-the-japan-korea-dispute/>, 13 Februari 2020

⁹³ Ibid

⁹⁴ Reiji Yoshida & Satoshi Sugiyama. 2019. GSOMIA survives as South Korea reverses decision to exit intel pact with Japan, diakses <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/11/22/national/politics-diplomacy/japan-south-korea-gsomia-talks/#.XkY1JYgzbiU>, 13 Februari 2020

kedua negara ke dalam pertikaian diplomatik yang lebih besar⁹⁵. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan dia yakin keputusan di menit-menit terakhir tersebut sangat strategis bagi Korea Selatan mengingat ancaman Korea Utara. Shinzo Abe menegaskan bahwa sangat penting bagi Jepang, Korea Selatan dan AS untuk bekerja sama dan mengoordinasikan tindakan untuk mengatasi Korea Utara⁹⁶.

Perpanjangan perjanjian tersebut tampaknya secara simbolis dan praktis dapat meningkatkan stabilitas lingkungan keamanan Asia Timur. Ini karena kedua negara memiliki konsekuensi langsung untuk berbagi informasi intelijen tentang hal-hal yang berkaitan dengan Korea Utara. Kim You-geun, sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan, mengatakan Seoul telah memutuskan untuk menghentikan proses pengaduan dengan Organisasi Perdagangan Dunia mengenai kontrol ekspor Jepang. Hal ini terjadi selama pembicaraan antara Korea Selatan dan Jepang berjalan baik⁹⁷.

5.3 *Spiritual Approach*: Upaya Rehabilitasi Mantan *Comfort Women* Korea Selatan oleh Pemerintah Jepang

Pada tahap *spiritual approaches* yang merupakan tahap rekonsiliasi terakhir menurut Valerie Rosoux, ditandai dengan adanya proses rehabilitasi korban dan

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Koya Jibiki & Kim Jaewon. 2019. South Korea reverses decision to end GSOMIA intel pact with Japan, diakses dari <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-South-Korea-rift/South-Korea-reverses-decision-to-end-GSOMIA-intel-pact-with-Japan>, 13 Februari 2020

⁹⁷ Ibid



pelaku konflik dalam hal ini mantan pekerja seks di masa kolonial Jepang atau yang biasa disebut dengan *comfort women*. Salah satu isi dari perjanjian *comfort women* tahun 2015 adalah Jepang akan memberikan kompensasi sebesar 1 miliar yen atau setara dengan 8,3 juta dollar kepada para mantan *comfort women* Korea Selatan.

Bersamaan dengan penandatanganan *Agreement on Comfort Women* 2015, masing-masing perwakilan dari Korea Selatan dan Jepang memberikan pernyataan resmi mereka kepada publik. Jepang yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Kishida, menyatakan beberapa poin penting sebagai berikut⁹⁸:

(1) Masalah wanita penghibur, dengan keterlibatan otoritas militer Jepang pada waktu itu, merupakan penghinaan besar terhadap kehormatan dan martabat sejumlah besar perempuan, dan Pemerintah Jepang dengan susah payah menyadari tanggung jawab dari perspektif ini. Sebagai Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Abe menyampaikan lagi permintaan maafnya yang paling tulus dan penyesalannya kepada semua wanita yang menjalani pengalaman yang tidak terukur dan menyakitkan serta menderita luka fisik dan psikologis yang tak dapat disembuhkan sebagai wanita penghibur.

(2) Pemerintah Jepang telah dengan tulus menangani masalah ini. Berdasarkan pengalaman tersebut, Pemerintah Jepang akan mengambil langkah-langkah untuk menyembuhkan luka psikologis semua mantan wanita penghibur melalui

⁹⁸ Ministry of foreign affairs of japan. 2015. Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion, diakses dari https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html, 13 Februari 2020



anggaranannya. Untuk lebih spesifik, telah diputuskan bahwa Pemerintah ROK mendirikan sebuah yayasan dengan tujuan memberikan dukungan bagi para mantan wanita penghibur, bahwa dana mereka disumbangkan oleh Pemerintah Jepang sebagai sumbangan satu kali melalui anggaranannya, dan bahwa proyek-proyek untuk memulihkan kehormatan dan martabat serta menyembuhkan luka psikologis semua mantan wanita penghibur dilaksanakan di bawah kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah ROK.

- (3) Sementara menyatakan hal di atas, Pemerintah Jepang menegaskan bahwa masalah ini akhirnya diselesaikan dan tidak dapat dibatalkan dengan adanya pengumuman tersebut, dengan alasan bahwa Pemerintah akan terus menerapkan langkah-langkah yang ditentukan dalam dua poin di atas. Selain itu, bersama dengan Pemerintah ROK, Pemerintah Jepang akan menahan diri untuk tidak saling menuduh atau mengkritik masalah ini di masyarakat internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan perjanjian bilateral yang dicapai pada Tahun 2015 itu, Jepang mendanai Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan yang berpusat di Seoul. Yayasan ini dimaksudkan untuk wanita Korea yang dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang selama penjajahan Jepang di semenanjung Korea pada 1910-1945. Namun pada tahun 2019, kantor berita Kyodo melaporkan bahwa pemerintah Korea Selatan membubarkan yayasan tanpa persetujuan dari pemerintah Jepang. Langkah ini dilakukan setelah Jepang membatasi ekspor barang-barang elektronik penting ke industri telepon Korea Selatan. hal ini menyebabkan kemarahan di Seoul yang

mengutuk keputusan tersebut dan sedang mempertimbangkan arbitrase internasional⁹⁹.

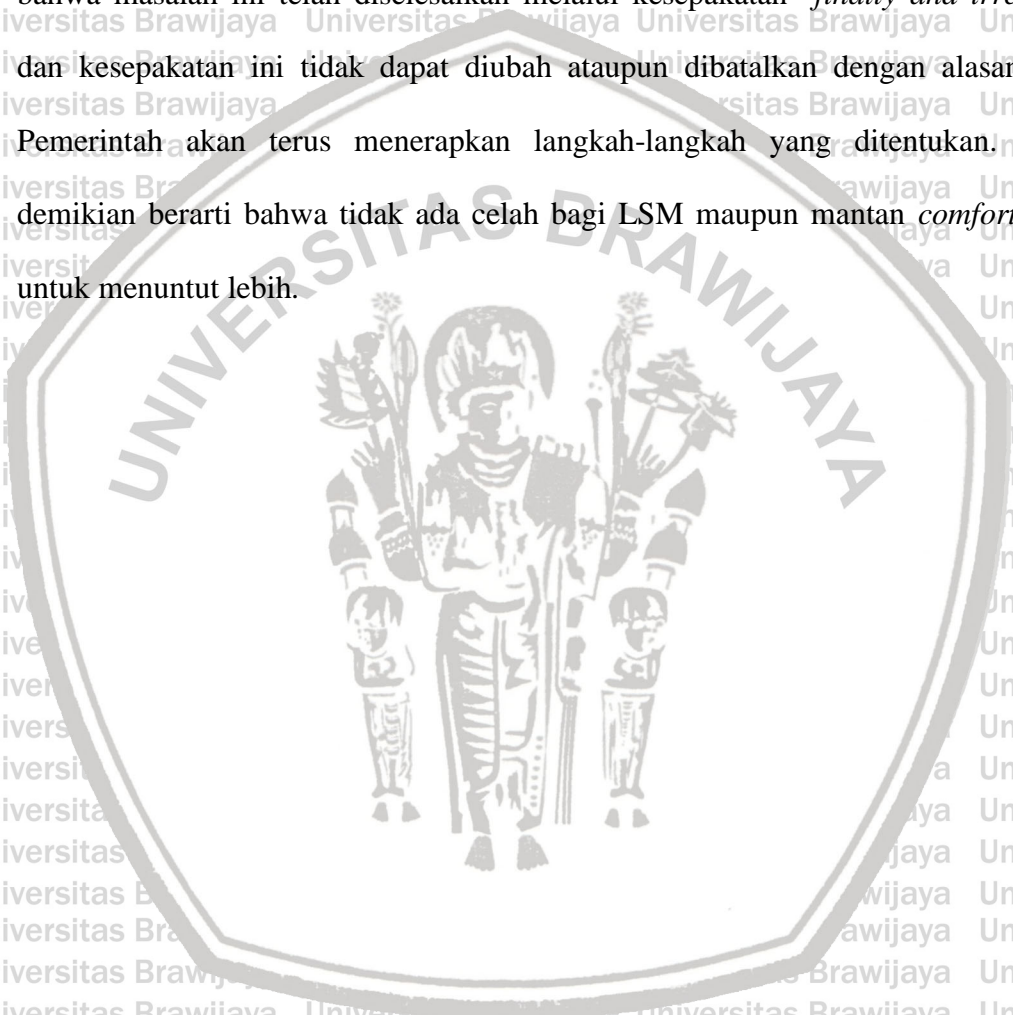
Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yasutoshi Nishimura, mengatakan Jepang tidak akan pernah bisa menerima pembubaran itu. Perjanjian 2015 memungkinkan Jepang untuk membayar dukungan keuangan kepada mantan "wanita penghibur" melalui yayasan. Jepang menyediakan 1 miliar yen kepada yayasan untuk membantu mantan wanita penghibur dan keluarga mereka ketika Park Geun Hye masih menjadi presiden Korea Selatan. Meski telah memberikan kompensasi keuangan, nyatanya kesepakatan tersebut membuat sedih banyak orang di Korea Selatan yang mendorong pemerintahan Moon Jae-in untuk membubarkannya. Kyodo melaporkan bahwa 47 "wanita penghibur" masih hidup ketika kesepakatan tersebut tercapai. Banyak korban dan kerabat mereka telah menerima pembayaran dari pemerintah Jepang. Namun, beberapa korban yang selamat menolak untuk mengambil uang itu¹⁰⁰.

Para mantan *comfort women* tersebut kecewa karena pemerintah Jepang tidak melibatkan mereka secara langsung baik dalam hal perumusan *agreement* maupun dalam proses permintaan maaf yang tidak secara langsung disampaikan kepada mereka. Selain itu, pemberian kompensasi pun menimbulkan polemik karena dana berupa sumbangan yang diberikan oleh pemerintah Jepang juga merupakan dana

⁹⁹ Rizal UI Khaliq. 2019. South Korea Closes Japan-Funded Foundation. Diakses dari <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/south-korea-closes-japan-funded-foundation/1524069>, 13 Februari 2020.

¹⁰⁰ Ibid

kontribusi sekali melalui anggaran dan proyek pemerintah untuk memulihkan kembali kehormatan dan martabat serta penyembuhan luka psikologis dari semua perempuan korban *jugun ianfu* Jepang. Terlebih lagi Pemerintah Jepang menegaskan bahwa masalah ini telah diselesaikan melalui kesepakatan *finally and irreversibly* dan kesepakatan ini tidak dapat diubah ataupun dibatalkan dengan alasan bahwa Pemerintah akan terus menerapkan langkah-langkah yang ditentukan. Dengan demikian berarti bahwa tidak ada celah bagi LSM maupun mantan *comfort women* untuk menuntut lebih.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat di simpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan *structures and institutions approaches*, Korea Selatan-Jepang telah melewati tahap rekonsiliasi yang pertama yaitu ditandai dengan adanya kesepakatan GSOMIA di bidang militer yang berupa berbagi informasi intelejen bersama diantara keduanya. Sementara itu dari sisi ekonomi, setelah normalisasi hubungan diplomatik, Jepang memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Selatan dan perdagangan mulai berkembang. Ada juga peningkatan interaksi di bidang lain, seperti pendirian perusahaan patungan dan kerjasama teknis
2. Berdasarkan *relationships approaches*, yang ditandai dengan pemulihan hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang dari aspek emosional dan kognitif. Hal ini dapat dilihat dari saling menurunnya tensi dan ketegangan serta ego masing-masing Negara dalam mengatasi permasalahan yang muncul setelah kesepakatan *comfort women* tahun 2015. Masalah tersebut adalah pernyataan presiden Moon bahwa kesepakatan tahun 2015 tersebut adalah cacat. Namun reaksi Jepang tidak serta merta meledak seperti sebelum-sebelumnya. Masalah lain yang juga muncul adalah adanya wacana pembatalan kesepakatan GSOMIA oleh Korea Selatan. Namun hal tersebut

tidak benar-benar terjadi setelah AS memediasi kedua Negara untuk tetap saling menjaga hubungan baik.

3. Berdasarkan *spiritual approaches*, Pemerintah Jepang melakukan proses rehabilitasi korban dan pelaku konflik dalam hal ini mantan pekerja seks di masa kolonial Jepang atau yang biasa disebut dengan *comfort women*. Salah satu isi dari perjanjian *comfort women* tahun 2015 adalah Jepang akan memberikan kompensasi sebesar 1 miliar yen atau setara dengan 8,3 juta dollar kepada para mantan *comfort women* Korea Selatan. Untuk lebih spesifik, telah diputuskan bahwa Pemerintah Korea Selatan mendirikan sebuah yayasan dengan tujuan memberikan dukungan bagi para mantan wanita penghibur, bahwa dana mereka disumbangkan oleh Pemerintah Jepang sebagai sumbangan satu kali melalui anggarannya, dan bahwa proyek-proyek untuk memulihkan kehormatan dan martabat serta menyembuhkan luka psikologis semua mantan wanita penghibur dilaksanakan di bawah kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Korea Selatan.

6.2 Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperpanjang batasan waktu penelitian maupun dengan memperluas bahasan dengan menggunakan teori rekonsiliasi lainnya. Dengan demikian

diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih luas dan beragam terkait dengan topik terkait dalam penelitian ini.

2. Bagi pemerintah Jepang sebaiknya terus konsisten dalam menangani masalah

comfort women di Korea Selatan sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini guna mendapatkan kepercayaan publik baik di Korea Selatan maupun di mata dunia. Selain itu, isu *comfort women* yang tidak hanya di Korea Selatan saja diharapkan juga tidak luput dari perhatian pemerintah Jepang. Sebab, luka traumatis akibat kekejaman kolonialisme Jepang pasti sangat membekas pada korban-korbannya.

3. Bagi pemerintah Korea Selatan, diharapkan dapat bekerjasama secara baik

dengan para korban atau eks *comfort women* untuk mengetahui secara mendetail mengenai aspirasi mereka. Meskipun telah ada perjanjian, namun faktanya para korban masih ada yang tidak terima terhadap isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu keterlibatan para mantan *comfort women* di Korea Selatan ini memegang peranan yang cukup penting untuk kemudian menghindari konflik berkelanjutan atas permasalahan ini meskipun telah ada kesepakatan antara Korea Selatan-Jepang melalui *Agreement on Comfort Women* tahun 2015. Disinilah peran negara dalam hal ini Korea Selatan sangat krusial dan dibutuhkan untuk menjembatani nasib korban guna mendapatkan apa yang mereka inginkan dan menjalani kehidupan yang layak dan lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Charles a. McClelland. 1986. Ilmu Hubungan Internasional: Teori Dan Sistem. Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 166

Cheol-Hee Park. 2015. Still Distant Neighbors:South Korea-Japan Relations Fifty Years After Diplomatic Normalization. Council on Foreign Relations. Hal 2

Christopher E. Miller. 2005. *A glossary of terms and concepts in peace and conflict studies second edition. University for peace.* Hlm 66

Crocker, David A. 1999. *Reckoning with Past Wrongs: A Normative Framework. Ethics & International Affairs* 13(1), 43-64

Daniel Bar-Tal. 2008. *Reconciliation as a Foundation of Culture of Peace. Handbook on Building Cultures of Peace* © Springer Science + Business Media, LLC, hlm 370

Glosserman, Brad., Scott A. Snyder. 2015. *The Japan-South Korea Identity Clash.* New York: Columbia University Press

Henry Scott Stokes. 2014. *Fabricating Historical Facts by Published by the Society for the Dissemination of Historical Fact*

Hidehiko Mukoyama. 2016. Can Japan and South Korea Build A New Economic Relationship? —Recent Changes in the Global Environment May Help to Repair Relations—. *Pacific Business and Industries* Vol. XVI, 2016 No. 59

Ja-hyun Chun & Youcheer Kim. 2014. *A New Interpretation of Korea-Japan Relations: 'Rights Revolution' of Sex Slaves and Forced Laborers in the Courtroom. The Korean Journal of International Studies* Vol.12-1 (June 2014), hal. 255-276. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.14731/kjis.2014.06.12.1.255>, tanggal 04 April 2019

Jumaningsih, Maia. 1999. Dampak Kekerasan Seksual pada Jugun Ianfu. Yogyakarta: Ford Foundation PPK-UGM, Hlm. 6

Kan Kimura. 2015. *Discourses About Comfort Women in Japang, South Korea, and International Society. International Relations and Diplomacy*

Komariah, A. Satori, D. 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.

Lederach, John Paul. 2002. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press. Hlm 35

Lee, Kangkyu. 2017. *The Comfort Women Agreement: An Analysis of The Motivations That Led to Park Geun-Hye's Acquiescence*. A Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington, DC.

Mohammad Mulyadi, *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol.16 No.1 (Januari-Juni 2012), hlm 77.

Pyong Gap Min. 2003. Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class, diakses dari <https://doi.org/10.1177/0891243203257584> pada 05 Februari 2020

Shin, G.-W., Sneider, D. C., & Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center. (2007). *Cross currents: Regionalism and nationalism in Northeast Asia*. Stanford, CA: Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center, Stanford University

Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tom Le. (tanpa tahun). *Negotiating in Good Faith: Overcoming Legitimacy Problems in the Japan-South Korea Reconciliation Process*. Hal 2

Tsutomu Nishioka. 2015. *The Comfort Women Issue in Sharper Focus*. Tokyo: Japan Policy Institute, Hal 12

Valerie Rosoux. 2017. *Negotiating Reconciliation in Peacemaking* © Springer International Publishing AG. DOI 10.1007/978-3-319-62674-1_2, hlm 16

Yayori Matsuri, *Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery: Memory, Identity and Society* dalam Peter Li. 2009. *Japanese War Crimes The Search for Justice*. New Brunswick: Transaction Publishers, Hal 259

Website:

Amaradhanu, Denny. 2015. *Pertemuan Korsel-China-Jepang akan Bahas Jugun Ianfu*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030145533-113-88456/pertemuan-korsel-china-jepang-akan-bahas-jugun-ianfu>, pada 19 September 2019

Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *Number of comfort Stations and Comfort Women*. Diakses dari <http://www.awf.or.jp/el/facts-07.html> pada 19 September 2019

Asian Women's Fund. (tanpa tahun). *How Did The Comfort Women Issue Come to Light?* Diakses dari <http://www.awf.or.jp/e2/survey.html> pada 06 Februari 2020

Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/korea.html> pada 05 Februari 2020

Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-09.html> pada 05 Februari 2020

Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-01.html> pada 05 Februari 2020

Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-12.html> pada 05 Februari 2020

Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-00.html> pada 05 Februari 2020

Asian Women's Fund, diakses dari <http://www.awf.or.jp/e1/facts-12.html> pada 05 Februari 2020

BBC News. 2017. Jepang tarik duta besarnya terkait patung 'budak seks' di Korea Selatan Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527303>, 10 Februari 2020

BBCNewsIndonesia. 2014. Pertemuan Pertama Pemimpin Jepang dan Korea, Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140321_jepang_korsel_bertemu, pada 19 September 2019

Hariska Farida dkk.2010.Koran Viva news terbitan 10 Agustus 2010."Dosa masa lalu,Jepang minta maaf ke Korsel" diakses dari di <http://www.vivanews.co.id/news/read/170165> pada 19 September 2019

Hendrajit.2016."Analisis dalam Jugun Ianfu(Comfort Woman)".The Global Review bisa diakses di www.theglobalreview.com/content-detail pada 19 September 2019

Hyeong guk Jo, 2014.22nd anniversary of Wednesday demonstration.Korea Selatan : The Kyunghyang Shinmun, diakses 13 Februari 2020

Joyce Lee & Hyonhee Shin. 2017. South Korea says 'comfort women' deal flawed, but Japan warns against change, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-comfortwomen/south-korea-says-comfort-women-deal-flawed-but-japan-warns-against-change-idUSKBN1EM056>, 13 Februari 2020

Korean Times. 2007. *Comfort Women Used to Prevent Military Revolt During War*, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/10/117_14697.html, pada 19 September 2019

Korea Verband. 2017. *Die Friedensstatue*, diakses dari <http://www.koreaverband.de/trostfrauen/friedensstatue>, pada 19 September 2019

Koya Jibiki & Kim Jaewon. 2019. **South Korea reverses decision to end GSOMIA intel pact with Japan, diakses dari <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-South-Korea-rift/South-Korea-reverses-decision-to-end-GSOMIA-intel-pact-with-Japan>**, 13 Februari 2020

Ministry of Foreign Affairs of Japan. Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of "comfort women", diakses dari <https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html>, 06 Februari 2020

Ministry of foreign affairs of japan. 2015. Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion, diakses dari https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html, 13 Februari 2020

Muhammad Rasid Ridho, *Metode Penelitian: Jenis Penelitian*, 26 Oktober 2015, diakses dari <http://emerer.com/metode-penelitian-jenis-penelitian/> pada 19 Desember 2018.

NHK world news.Koran NHK World terbitan 28 Desember 2015, diakses di www.nhkworldnes.id pada 19 September 2019

Noviyanti Nurmala. 2018. Menelusuri Sejarah Hitam Wanita Korea Selatan di House of Sharing. <https://kumparan.com/noviyanti-nurmala1519197736585/menelusuri-sejarah-hitam-wanita-korea-selatan-di-house-of-sharing>

Nugroho, Iqbal. 2015. Melihat Lebih dekat Patung Jugun Ianfu di Korea Selatan. Diakses dari <https://www.merdeka.com/foto/dunia/643700/20151229231713-melihat-lebih-dekat-patung-jugun-ianfu-di-korea-selatan-001-isn.html>, 06 April 2019

Reiji Yoshida & Satoshi Sugiyama. 2019. GSOMIA survives as South Korea reverses decision to exit intel pact with Japan, diakses <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/11/22/national/politics-diplomacy/japan-south-korea-gsomia-talks/#.XkY1JYgzbIU>, 13 Februari 2020

Rizal Ul Khaliq. 2019. South Korea Closes Japan-Funded Foundation. Diakses dari <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/south-korea-closes-japan-funded-foundation/1524069>, 13 Februari 2020.

Stephen Haggart, "The Comfort Women Agreement", diakses dari <https://piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/comfortwomen-agreement#content>, pada 19 September 2019

Sterngold, James (5 August 1993). "**Japan Admits Army Forced Women Into War Brothels**". *The New York Times*.

Tempo.co. 2015. Kasus Jugun Ianfu, Jepang Minta Maaf pada Korea Selatan, diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/731342/kasus-jugun-ianfu-jepang-minta-maaf-pada-korea-selatan/full&view=ok>, pada 19 September 2019

The Mainichi. 2016. Japan, S. Korea sign intelligence-sharing pact over N. Korean threat, diakses dari <https://mainichi.jp/english/articles/20161124/p2a/00m/0na/008000c>, 13 Februari 2020

Victor Cha. 2019. The Meaning of GSOMIA Termination: Escalation of the Japan-Korea Dispute, diakses dari <https://beyondparallel.csis.org/the-meaning-of-gsomia-termination-escalation-of-the-japan-korea-dispute/>, 13 Februari 2020

